



PERUBAHAN POLITIK LUAR NEGERI
REPUBLIC ISLAM IRAN
DIBAWAH PRESIDEN MUHAMMAD KHATAMI
(ISSUE POROS TEHERAN MOSKOW)

S K R I P S I

Dijadikan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh :

Dippu Maulana

NIM ; 970910101075

Pembimbing

Drs. Soekron Sjah. SU

NIP. 130 325 930

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

2002



LEMBAR PERNYATAN

Saya menyatakan bahwa skripsi ini hasil karya asli saya dan semua bahan yang digunakan berasal dari sumber yang sah dan diketahui.

Penulis

Dippu Maulana

97 - 1075



PENGESAHAN

Diterima dan Dipertahankan
Dihadapan Panitia Penguji Skripsi
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Pada :

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

Hari : Rabu

Tanggal : 4 September 2002

Pukul : 08.00

Panitia Penguji,

Ketua Panitia,

Prof. Dr. A. Khusyairi, MA

Sekretaris

Drs. Soekron Sjah, SU

Tim Penguji

1. Prof. Dr. A. Khusyairi, MA. ()
2. Drs. Sjoekron Sjah, SU. ()
3. Drs. Azrial Aziz. ()
4. Drs. Ach. Habibullah, Msi. ()



Drs. H. Moch Toerki

NIP. 130 524 832



PERSEMBAHAN

Karya tulis ini penulis persembahkan kepada :

Yang Terhormat Kedua Orang Tua-Ku :

AYAHANDA ZAINAL ARIFIN

IBUNDA KUMAIDAH. S.PD.

Yang Tersayang Adik-adikku :

LESVITA DAMAYANTI

INTAN MAHARANI

Yang Tercinta :

Keluarga Besar Alm. BAPAK ABDUL RUSLAN

Almamaterku :

Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jember

Agamaku

Islam

Serta

Negara dan BangsaKu :

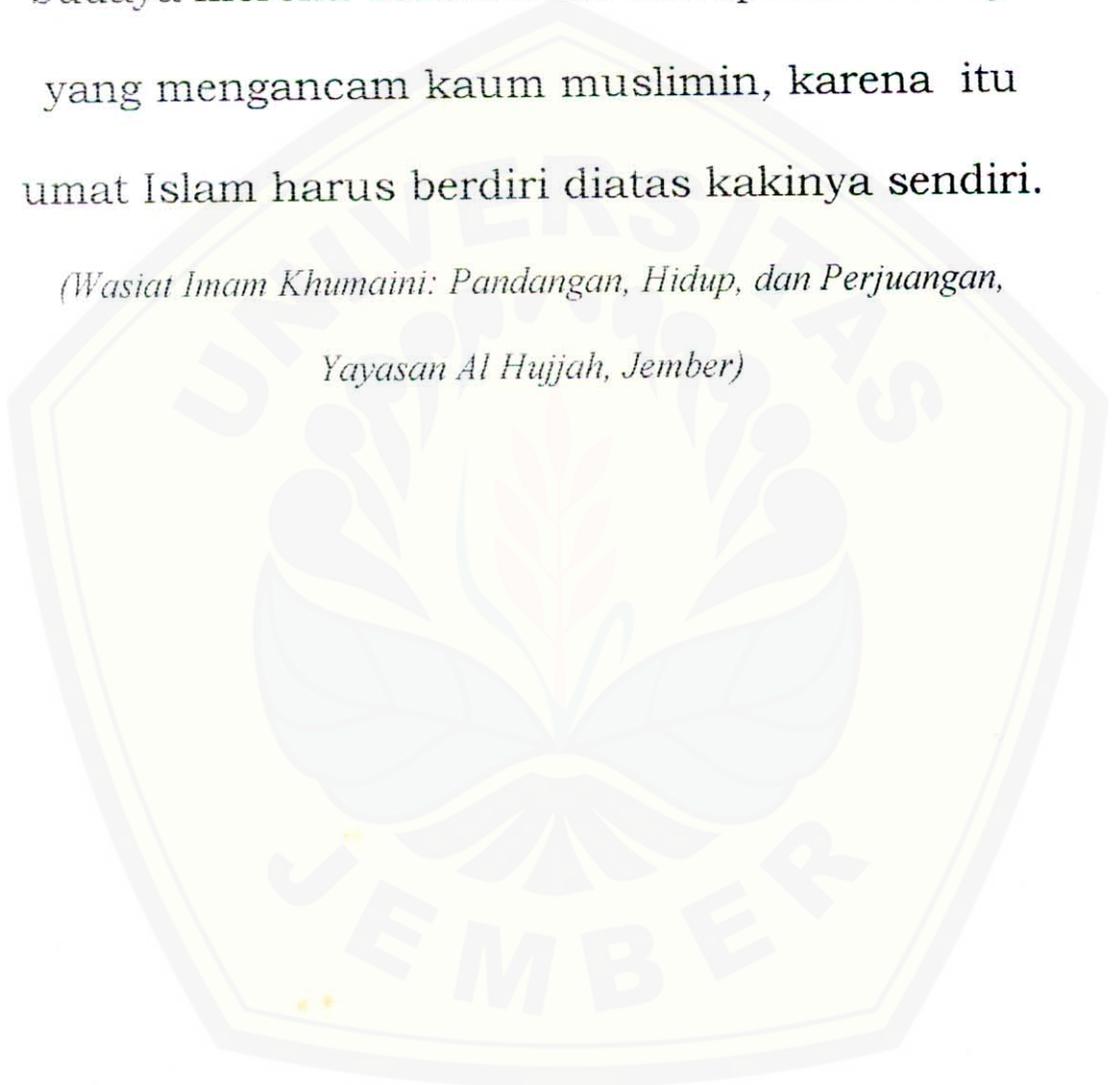
INDONESIA

MOTTO

Keterikatan pada timur dan barat dan mencontoh budaya mereka secara buta merupakan budaya yang mengancam kaum muslimin, karena itu umat Islam harus berdiri diatas kakinya sendiri.

(Wasiat Imam Khumaini: Pandangan, Hidup, dan Perjuangan,

Yayasan Al Hujjah, Jember)



KATA PENGANTAR

Terbersit dalam diri untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala hidayah, ridho, kasih dan sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai tugas dalam menempuh jenjang pendidikan strata satu yang bergelar Sarjana Strata Satu (S1).

Suatu kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi penulis setelah melewati berbagai pengalaman, dukungan maupun hambatan dalam penyelesaian tugas akhir ini, dan merupakan hal yang paling tak ternilai harganya bagi penulis yaitu kebersamaan selama berada di lingkaran Hubungan Internasional 1997, FISIP, Universitas Jember sampai terselesaikan skripsi yang berjudul : **Perubahan Kebijakan Politik Luar Negeri Iran di Bawah Presiden Muhammad Khatami (issue poros Teheran-Moskow)**. Skripsi ini merupakan sebagian dari akumulasi ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan dalam petualangan intelektual yang tidak akan pernah habis sampai panggilan untuk kembali pada -Nya.

Demikian pula penulisan karya ini di susun sebagai suatu tantangan bagi penulis untuk mencoba memahami gejolak yang terjadi di kawasan Timur Tengah pada umumnya dan Republik Islam Iran pada Khususnya. Dengan mencoba melihat akar permasalahan secara lebih luas, menyeimbangkan cara berpikir dan bertingkah laku sesuai pada norma ketimuran yang memang sebagian besar dianut oleh negara di kawasan Timur Tengah.

Selama proses akumulasi pengetahuan maupun dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik langsung maupun kuliah tidak

langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan sangat berterima kasih kepada pihak – pihak di bawah ini :

1. Bpk.Drs.Soekran .Sjah, SU., selaku dosen pembimbing sekaligus Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Univ. Jember, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk untuk menuntun penulismenyelesaikan skripsi ini.
2. Bpk. Drs. Achmad Habibullah Msi., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah.
3. Bpk Drs. H . Moch. Toerki, selaku Dekan FISIP, Univ. Jember.
4. Seluruh dosen, karyawan yang telah banyak membantu lancarnya penyelesaian tugas akhir ini
5. Rekan-rekan HI angkatan 97 tanpa terkecuali, I love You All..
6. Semua pihak yang telah membantu,yangtak dapat penulis sebutkan satu persatu.

The last but not least, penulisan ini tidak akan terselesai kan tanpa doa, usaha dan ketulusan kasih sayang dari kedua orang penulis. Tak ada ungkapan yang dapat untuk menyampaikan betapa besar rasa terima kasih penulis pada orang tua.

Akhir kata, penulis berharap untuk dapat mengembangkan cakrawala berfikir dengan seizin Allah S.W.T dan semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkannya, Amiin.

Jember, Agustus 2002

Penulis



DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Motto	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	6
1.2.1 Batasan Waktu	7
1.2.2 Batasan Materi	8
1.3 Permasalahan	8
1.4 Kerangka Dasar Teori	9
1.5 Hipotesis	17
1.6 Metode Penelitian	18
1.6.1 Teknik Pengumpulan Data	18
1.6.2 Teknik Analisa Data	19
1.7 Pendekatan	19

II GAMBARAN UMUM REPUBLIK ISLAM IRAN	
2.1 Karakteristik Republik Islam Iran	21
2.1.1 Sejarah Negara Iran	21
2.1.2 Masa Pra Islam	22
2.2 Masa Awal Masuknya Islam	24
2.2.1 Masa Dinasti Safawi Dan Qajar	25
2.2.2 Dinasti Pahlevi	26
2.3 Berakhirnya Sistem Monarkhi	27
2.4 Bedirinya Republik Islam Iran	27
2.4.1 Figur Pendiri republik Islam Iran	30
2.4.2 Pendidikan Imam Khomaeni	31
2.4.3 Perjalanan Hidup Khomaeni Di Masa Perjuangannya	31
2.5 Sejarah Aliran Islam Syiah	32
2.5.1 Al -Imamah	33
2.6 Konsep Pemerintahan Dengan Prinsip Wilayahul Faqih	36
2.7 Kompoenen-komponen Pemerintahan	38
III IRAN PASCA IMAM KHUMAENI	
3.1 Politik Luar Negeri	41
3.2 Penyebab Perubahan Kebijakan yang Diambil	
Presiden Mohammad Khatami	42
3.3 Tanda-tanda terjadinya Rekonsiliasi (Poros Teheran Moskwo)	45
3.4 Timbulnya Rekonsiliasi Politik Dengan Rusia	47
3.5 Politik Luar Negeri Iran	48

3.5.1 Hubungan Iran-Soviet	51
3.5.2 Hubungan Politik Luar Negeri Iran-Inggris	53
3.5.3 Hubungan Iran-Amerika	54
3.5.4 Dinamika Hubungan Iran-Rusia Pasca Shah Reza Pahlevi ...	54
3.6 Politik Moskow di Timur Tengah	56
3.6.1 Pasang Surut	57
3.6.2 Konflik Kepentingan dari Pergolakan Azarbaijan	64
3.7 Manufer Baru Iran	69
IV FAKTOR-FAKTOR M. KHATAMI MELAKUKAN REKONSILIASI	
4.1 Dimensi Internal Republik Islam Iran	71
4.2 Dimensi Eksternal Timur Tengah Pasca Perang Teluk	72
4.3 Dimensi Regional (Iran Dan Muslim Asia tengah)	73
4.3.1 Dampak Pergolakan Azerbaijan Bagi Hubungan Iran-Soviet	76
4.4 Keuntungan Yang Diperoleh Iran	77
4.5 Perkembangan Negeri Kaum Mullah	79
4.5.1 Estimasi Jangka Panjang	80
4.5.2 Peluang Dan Kendala	82
V KESIMPULAN	84
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul

Sebelum memasuki pokok bahasan dalam penulisan ini, penulis akan memberikan gambaran tentang Timur Tengah. Banyak versi dan ahli yang mencoba mengulas dan mengurai wilayah Timur Tengah, akan tetapi tidak satupun yang dapat memberikan patokan yang paten, sehingga sampai saat ini belum ada kesepakatan diantara para ahli.

Pendapat pertama, menyebutkan bahwa wilayah Timur Tengah adalah negara Arab non Afrika ditambah Israel. Dengan definisi ini, negara-negara Arab yang terletak di Afrika Utara seperti Mesir, Libya, Maroko, dan Aljazair tidak dapat dimasukkan dalam kategori wilayah Timur Tengah. Pemahaman seperti ini misalnya dianut oleh David E. Long dan Bernard Reinch. Pendapat kedua, mengartikan Timur Tengah sebagai negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab ditambah Iran, Israel dan Turki. Pandangan ini antara lain dianut oleh Roy.R. Anderdson, Robert.F. Seibert, John.G. Wagner, dan Robert.O. Freddman. Sedangkan pandangan ketiga adalah yang memasukkan negara-negara seperti Afganistan, Pakistan, bahkan negara-negara Asia Tengah bekas Uni Soviet ke dalam wilayah Timur Tengah. Hal ini terlihat antara lain pada majalah *The Middle East* (terbitan Inggris) dan *The Middle East Journal* (terbitan Amerika Serikat).¹

¹ Reza Sihbudi dkk, *Profil Negara-Negara Timur Tengah*. Pustaka Jaya. Jakarta, 1995.

Dari ketiga pendapat tersebut penulis cenderung memilih pandangan kedua yakni Timur Tengah adalah semua negara Liga Arab ditambah Iran, Israel, dan Turki. Dengan demikian negara-negara yang termasuk dalam wilayah Timur Tengah adalah Aljazair, Arab Saudi, Bahrein, Djibouti, Irak, Iran, Israel, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Palestina, Qatar, Somalia, Sudan, Suriah, Tunisia, Turki, Uni Emirat Arab, Yaman dan Yordania.

Ketertarikan penulis untuk membahas Iran dalam hal ini di latar belakang oleh dinamika politik yang sangat dinamis dan fluktuatif di kawasan Timur Tengah pada umumnya. Sedangkan secara khusus membahas Iran, penulis mempunyai beberapa alasan, antara lain menggali konsep Wilayatul Faqih yang sangat menantang sekali untuk dikaji dan yang utama adalah keberanian Presiden M. Khatami membuka hubungan dengan Rusia, sedangkan jika didasarkan pada sistem religi antara keduanya sangatlah berbeda jauh. Iran adalah sebuah negara yang berbentuk Republik Islam yang segalanya bertumpu pada hukum Islam. Dan Rusia dengan ideologi komunis adalah bangsa yang tidak mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa.

Keberadaan Iran saat ini di bawah Presiden M. Khatami sangat disegani oleh berbagai negara termasuk Amerika Serikat. Hal itu terjadi karena Iran dianggap sebagai sponsor terorisme dan penghalang perdamaian Israel-Palestina.² Hal ini terlihat dari kecaman George W Bush ke Vladimir Putin sebagai Presiden Rusia, sehari setelah kunjungan M. Khatami ke Moskow. Dan tercatat terjadi dua kali protes keras oleh Amerika Serikat Ke Moskow dalam

² Noam, Chomsky. *International Terrorism I the Real World*, Amana. Book, Inc, 1986, halaman 71

kurun waktu 48 jam.³ Sebagian besar media di barat menggambarkan kunjungan M. Khatami ke Rusia adalah sebagai akar baru terbentuknya Poros Teheran moskow.⁴ Akan tetapi dalam hal ini Iran dan Rusia memberikan penjelasan bahwa kerja sama keduanya ini tidak akan mengganggu keberadaan barat beserta sekutunya. Penjelasan statement ini terungkap dalam bentuk konferensi pers yang dilakukan Presiden M. Khatami, setelah berpidato selam 60 menit di depan Majelis Rendah di Moskow.⁵

Perubahan arus politik luar negeri Iran yang sangat drastis tersebut tidak muncul begitu saja, akan tetapi selalu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi politik dalam negeri, perubahan politik kawasan dan internasional serta tidak lepas pula oleh faktor *Decision Maker*. Tercatat dalam sejarah bahwa proses hubungan politik dan militer di Iran dengan Uni Soviet telah dimulai sebelum Shah Reza Pahlevi, yaitu tepatnya saat ayah dari Shah Reza Pahlevi berkuasa. Hal itu disebabkan ikatan Reza Shah yang demikian kuat dengan Nazi Jerman sehingga menyebabkan Inggris dan Uni Soviet menduduki Iran pada tahun 1941 dan kemudian memaksa Shah untuk menyerahkan kekuasaan ke putera mahkota yang saat itu masih berusia 20 tahun.

Pendudukan Uni Soviet ini berlangsung sampai 1946, pada saat itu Amerika Serikat dan PBB memaksa Uni Soviet meninggalkan Iran.⁶ Setelah itu naiklah Shah Reza Pahlevi dengan kekuasaan penuh. Hubungan politik yang terjadi antara Reza Shah dengan Uni Soviet meskipun tidak harmonis dan didasari oleh keterpaksaan, akan tetapi secara realita politik dianggap sebagai salah satu bentuk

³ Kompas, 19 Maret 2001.

⁴ Ibid, 16 Maret 2001.

⁵ Ibid, 17 Maret 2001.

⁶ Jhon. L.Eksposito. *Islam dan Politik*. Jakarta PT. Bulan Bintang, 1990, hal 170

interaksi politik dan militer meskipun hanya bersifat satu arah. Uni Soviet sebagai agresor dan Iran sebagai obyek.

Setelah Shah Reza berkuasa dan Uni Soviet meninggalkan Iran berkat bantuan PBB dan Amerika Serikat, maka sejak saat itulah hubungan Shah Reza Pahlevi dengan Amerika Serikat semakin dekat.⁷ Hal itulah yang mengakibatkan Shah Reza Pahlevi berporos ke Amerika Serikat. Kenyataan ini berlangsung selama Shah Reza Pahlevi berkuasa di Iran (1941-1979). Setelah meninggalnya Shah Reza Pahlevi (Januari 1979) maka berakhir pulalah sistem kerajaan di Iran sekaligus menghapus peran Amerika Serikat di Iran.

Bulan Februari 1979 adalah bulan bersejarah karena pada tanggal 11 Februari 1979 berdirilah negara Islam Iran di bawah pimpinan Imam Khumaini. Pada tanggal 1 April 1979 rakyat diminta memberikan suara melalui referendum nasional, setuju atau menolak pemerintahan Republik Islam. Ternyata dari hasil referendum tersebut diperoleh data bahwa 98,2 % rakyat mendukung berdirinya Republik Islam. Dengan demikian berdirilah Republik Islam Iran pada 1 April 1979.⁸

Pada saat pemimpin besar revolusi Islam Iran, Ayatullah Ruhullah Imam Khumaini dengan nama asli Sayyid Ruhullah Al Musawi Al Khumaini berkuasa, dengan menggunakan konsep Wilayatul Faqih dan ungkapan “*la Sunniyah la Syiyyah, Islamiyyah Islamiyyah*”, tidak Sunni dan tidak Syi’ah tapi Islam. Dan “*la Syarqiyyah la Gharbiyyah, Jumhuriyyah Islamiyyah*”, tidak timur dan tidak barat tetapi Pemerintahan Islam.⁹ Pada masa ini keberadaan pengaruh asing di Iran mulai hilang bahkan dengan kata lain, Iran

⁷ Opcit. 73 (Sihbudi)

⁸ Yayasan Al Hujjah, *Imam Khumaini (Pandangan Hidup dan Perjuangan)*. Panitia Peringatan Haul ke 11. Jember, 2000, Hal 20.

⁹ Ibid, hal 24.

melakukan politik netral yang cenderung mengisolasi diri dari peranannya di dunia internasional.

Fenomena ini ternyata menjadi lain ketika Iran dipimpin oleh Abol Hasan Bani Sadr sebagai presiden terpilih. Bani Sadr yang mendapat pendidikan barat ternyata mementahkan konsep kenetralan sehingga pada 22 Juni 1980, Bani Sadr dipecat oleh parlemen Iran yang didominasi oleh para ulama. Kemudian Bani Sadr kabur ke Perancis.¹⁰ Setelah kepergian Bani Sadr, maka kursi kepresidenan berpindah ke Ali Khomaeini yang ditunjuk oleh Imam Khomeini dan Hashemi Rafsanjani yang pernah menjadi juru bicara parlemen yang berpengaruh menjadi presiden, dengan kekuasaan tambahan akibat perubahan konstitusi pada 1989.

Iran mempunyai garis perbatasan sepanjang 1.740 Kilometer termasuk 630 Kilometer batas air yang untuk Iran merupakan garis perbatasan terpanjang dengan negara lain. Karenanya, dari segi geopolitik hubungan Iran menjadi sangat vital untuk kedua pihak.¹¹

Pada masa ini sampai Presiden Hashemi Rafsanjani belum terdapat kemajuan yang berarti dalam hubungan bilateral antara Iran dan Rusia (Uni Soviet kala itu). Hanya saja pada saat kunjungan Presiden Hashemi Rafsanjani ke Rusia yang waktu itu menjabat sebagai ketua majelis, mendapatkan sambutan kenegaraan dan diberikan kesempatan untuk berkhotbah di sebuah masjid di Baku, ibukota Republik Soviet Azerbaijan.¹² Dan terungkaplah pada saat itu pendapat Rafsanjani yaitu penarikan mundur pasukan Soviet dari Afganistan, matinya komunisme dan diperluasnya kebebasan

¹⁰ Kompas, 22 April 2001.

¹¹ Reza, Sihbudi. *Bara Timur Tengah*. Penerbit Mizan, Bandung, 1991, Hal 208.

¹² Kompas, 24 Juni 1989.

beragama bagi umat Islam Soviet, merupakan faktor-faktor pendukung bagi hubungan Teheran Moskow.¹³

Pasca perang kemerosotan Amerika Serikat terlihat drastis. memang pada saat terjadi Perang Teluk II, dominasi Amerika Serikat sangat menonjol sedangkan Moskow menarik diri karena tidak ingin mengalami benturan dengan Washington secara politis terutama di Timur Tengah.¹⁴

Keadaan terus berlangsung sampai runtuhnya Uni Soviet dan kemudian berdirilah Rusia sebagai sebuah negara baru di akhir abad ke 20. Sampai pada pemerintahan Vladimir Putin barulah terjadi pemikiran-pemikiran cerdas untuk mengatasi kasus dalam negeri khususnya untuk meredam gejolak separatis pejuang-pejuang Muslim di negara-negara bagian seperti Cechnya, Azarbaizan, Usbekistan, dan beberapa negara lainnya. Sementara itu selama Boris Yeltsin berkuasa, tidak terjadi hubungan politik dengan Iran. Sedangkan di pihak Iran sendiri selama Presiden Rafsanjani berkuasa tidak terdapat hubungan politik dengan Rusia. Barulah setelah masa pemerintahan Khatami, terjadi hubungan politik dengan Rusia banyak sekali tarikan-tarikan pemikiran mengenai hubungan ini, baik yang bersifat pro maupun yang bersifat kontra.

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan ini adalah sangat esensial sekali karena pembatasan permasalahan dapat menjaga biasanya sebuah permasalahan maupun pembahasan. Dalam bahasa ilmiah, ruang lingkup pembahasan seringkali disebut *scope of investigation*, yaitu

¹³ Sihbudi, Basyar, Zulkarnaen. *Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah*. PT. Eresco, Bandung, 1993. hal 136

¹⁴ Reza Sihbudi. *Bara Timur Tengah*. Penerbit Mizan Bandung, 1991, hal 232

seluruh kegiatan *research* harus dalam jangkauan tangan pelaksanaannya atau dengan kata lain adalah persoalan-persoalan *research* harus dipersempit sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah format yang dapat di awasi. Penyederhanaan permasalahan sampai *manageble size* (ukuran yang mudah dipahami) ini sangat diperlukan spesifikasi persoalan-persoalan yang ada beserta bahan-bahan yang dirasa perlu untuk diketahui.¹⁵ Untuk mempersempit dan sekaligus memperjelas permasalahan, maka batasan waktu yang penulis gunakan adalah Pasca Perang Teluk khususnya setelah Muhammad Katami menjadi Presiden Iran. Pembahasan permasalahan ini akan dipaparkan dalam dua sudut yang berbeda.

1.2.1 Batasan Waktu

Adapun pembatasan perodesasi atau rentang waktu yang digunakan oleh penulis, yaitu mulai Pasca Perang Teluk dan naiknya Presiden Republik Islam Iran Muhammad Khatami (1991-2001). Pembatasan rentang waktu ini penulis gunakan supaya analisis yang akan muncul sebagai jawaban dari permasalahan tidak meluas dan menjadikannya lebih obyektif dan koherens dengan fenomena yang terjadi.

Adapun pembatasan rentang waktu dimulainya Pasca Perang Teluk I antara Irak dan Iran, yang ketika itu Iran di pimpin oleh Imam Khomaini dengan Hashemi Rafsanjani sebagai Presiden. Pada masa Rafsanjani hubungan hubungan Iran – Rusia dapat dikatakan vakum. Oleh karena itu penulis menfokuskan permasalahan pada masa pemerintahan Muhammad Khatami, hal ini penulis ambil dalam rangka penyesuaian dengan judul yang penulis ajukan.

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1978,

1.2.2 Batasan Materi

Pembatasan materi, dimana fokus pembahasan berkisar pada latar belakang adanya kunjungan Presiden Muhammad Khatami ke Rusia dan faktor-faktor yang mendukung Iran untuk bekeja sama lagi dengan Rusia dan peristiwa-peristiwa politik yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, penulis menganggap bahwa peristiwa lampau dapat dijadikan acuan untuk mengetahui pola politik suatu negara.

1.3 Permasalahan

Ketika kita melakukan penulisan ilmiah, menentukan dan merumuskan suatu problematika atau permasalahan adalah hal yang paling penting karena sangat membantu dalam memberikan arah pada kegiatan ilmiah yang kita lakukan dan banyak hal yang akan mempermudah kita untuk memfokuskan arah pembahasan permasalahan.

Sebagaimana biasanya setiap pembahasan terhadap suatu masalah adalah merupakan suatu keharusan untuk memberikan fokus perhatian terhadap masalah-masalah yang dibahasnya.

Beberapa ahli mendefinisikan tentang problematika atau permasalahan adalah :

“Pemisahan-pemisahan daripada komplek kesulitan-kesulitan dan kebuntuan yang dijumpai oleh pikiran yang bekerja dalam situasi-situasi tertentu”.¹⁶

Sedang menurut A. Djohar tentang permasalahan problematika adalah “Problematika ini adalah berupa kalimat pertanyaan yang

¹⁶ Winardi, *Pengantar Metodologi Reserch*, PN Alumni Bandung, 1976. Hal 77.

tanpa tanda tanya yang merupakan masalah aktual dan menonjol yang sedang dibahas”.¹⁷

Berdasarkan pengertian di atas, maka penulisan problematika ini sangat menunjang sekali terhadap pembahasan permasalahan. Dalam hal ini, permasalahan yang disodorkan adalah : “Mengapa Republik Islam Iran di bawah Presiden Muhammad Khatami mengadakan rekonsiliasi hubungan dengan moskow?”.

Dengan permasalahan tersebut, diharapkan mampu menjelaskan perubahan kebijakan politik luar negeri Iran Pasca Perang Teluk dibawah pemerintahan Presiden Muhammad Khatami (issue poros Teheran- Moskow).

1.4 Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori adalah landasan berpijak dalam pemikiran mengenai suatu pendapat dengan menggunakan teori-teori untuk memecahkan dan menganalisa permasalahan.

Charles . Mc. Cleland mendefinisikan teori sebagai :

1. Kerangka dasar untuk mengatur fakta-fakta.
2. Pedoman untuk melakukan kegiatan.
3. Seperangkat pernyataan mengenai kenyataan yang diharapkan.
4. Pikiran spekulatif, bebas dari ikatan dengan dunia nyata.
5. Teori merupakan abstraksi.¹⁸

¹⁷ W. Surahmat. *Pengantar Metodologi Penelitian Ilmiah*, CV Tarsito, Bandung. 1970, hal 36

¹⁸ Charles A. Mc Clelad, *Ilmu Internasional, Teori dan Sistem*. CV. Rajawali, Jakarta. 1981. Hal 10.

Jadi, teori memegang peranan yang penting karena merupakan suatu konsep yang dapat menjelaskan fenomena yang kita amati dan membimbing jalannya penelitian.

Beranjak dari uraian di atas, maka untuk meneliti dan menganalisa kebijakan Presiden Muhammad Khatami dalam melakukan rekonsiliasi politik dengan Rusia, dalam hal ini menggunakan kerangka dasar teori *Decision Making*.

Menurut Richard C. Snyder, *Decision Making* didefinisikan sebagai, sebuah proses yang menyangkut pemilihan dari sejumlah masalah yang terbentuk secara sosial, pemilihan sasaran-sasaran alternatif yang ingin diterapkan dalam urusan negara yang dipikirkan oleh para pembuat keputusan.¹⁹

Teoritis hubungan internasional yang mempelajari politik luar negeri, yaitu Graham T. Allison, mengajukan tiga model untuk mendeskripsikan proses pembuatan keputusan politik luar negeri. Dalam studinya itu kasus yang dipakainya terutama adalah krisis nuklir Kuba antara Amerika Serikat – Uni Soviet. Berikut ini adalah ringkasannya.²⁰

Model 1 : Aktor Rasional

Dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintah yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan.

¹⁹ Richard C. Snyder, *Foreign Policy Decision Making An Approach to Study International Politics*, New York : The Free Press. 1962. Hal 90

²⁰ Graham T. Allison, *Essence Of Decision* (Little , Brown, 1971); "Conceptual Model's and the Cuban Missile Crisis," *American Political Science Review* (September 1969); dan Allison dan Morton Halperin, "Bureaucratic Politic: A Paradigm and Some Policy Implication," *World Politic*, Vol. 24 (1972).

Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu *proses intelektual*. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Dalam analogi individu itu melalui serangkaian tahap-tahap intelektual, dengan menerapkan penalaran yang sungguh-sungguh berusaha menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Jadi, unit analisis model pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahnya, dan perhitungan untung-rugi atas masing-masing alternatif itu.²¹ Seorang analis dianggap sudah bisa menjelaskan suatu politik luar negeri kalau ia bisa menunjukkan bahwa kebijaksanaan yang sedang dipelajarinya itu merupakan pilihan yang layak mengingat tujuan-tujuan strategis dari bangsa yang bersangkutan.

Dalam model ini digambarkan bahwa para pembuat keputusan dalam melakukan pilihan atas alternatif-alternatif itu menggunakan kriteria "optimalisasi hasil". Para pembuat keputusan itu digambarkan sebagai selalu siap untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam kebijaksanaannya. Mereka juga diasumsikan bisa memperoleh informasi yang cukup banyak sehingga bisa melakukan penelusuran tuntas terhadap semua alternatif kebijaksanaan yang mungkin dilakukan dan semua sumber-sumber yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan.

Model ini sangat terkenal terutama karena asumsi rasionalitas yang dikandungnya. Dalam model itu para pembuat keputusan itu dianggap rasional dan kita umumnya memang cenderung berfikir

²¹ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan metodologi*, LP3ES, 1990, Hal 234.

bahwa keputusan (terutama yang menyangkut politik luar negeri) dibuat secara rasional. Karena itulah, menurut Allison, model ini paling sering diterapkan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan politik luar negeri. Memang, kalau kita mencoba menganalisis dan menjelaskan mengapa para pembuat keputusan di negeri lain itu melakukan sesuatu, cara paling mudah adalah berasumsi bahwa mereka rasional dan kemudian menempatkan diri kita dalam posisi mereka. Dalam keadaan ini kita mencoba untuk mengetahui apa kira-kira tujuan mereka dengan melakukan tindakan tertentu itu. Dalam hal ini kita juga berasumsi bahwa pemerintah negara lain itu monolit, tidak terpecah belah, dan bahwa kejadian penting pasti disebabkan oleh suatu yang penting juga.

Asumsi-asumsi tentang perilaku tentang pemerintah yang monolit, perilaku menetapkan pilihan secara rasional dan bertujuan jelas itu dan asumsi tentang tersedianya informasi yang cukup dikritik oleh Allison karena tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Asumsi-asumsi itu mengabaikan fakta bahwa para pembuat keputusan itu adalah manusia yang bisa membuat kesalahan dan selalu menghadapi berbagai kendala eksternal dari birokrasinya sendiri, dari berbagai kelompok kepentingan, opini publik dan sebagainya. Terutama dalam sistem demokrasi, politik luar negeri tidak pernah bisa terlepas dari tuntutan politik domestik. Kelemahan-kelemahan model dan ketidaktetapan gambaran yang ditunjukkannya ini hendak diperbaiki oleh Allison dengan mengajukan dua model lain, yaitu model "proses organisasi" dan "politik birokratik".

Model II Proses Organisasi

Model ini menggambarkan politik luar negeri sebagai hasil kerja suatu organisasi besar yang berfungsi menurut suatu pola

perilaku. Pembuatan keputusan politik luar negeri bukan semata-mata proses intelektual tetapi lebih merupakan *proses mekanis*, yaitu pembuatan keputusan dilakukan dengan secara mekanik merujuk pada keputusan-keputusan yang telah dibuat di masa lalu, pada preseden, prosedur rutin yang berlaku, atau pada peran yang ditetapkan bagi unit birokrasi itu. Inilah pola perilaku yang disebut prosedur kerja baku (*standard operating procedure*).

Disini digambarkan bahwa semua organisasi pemerintahan memiliki catatan tentang perilakunya dimasa lalu yang selalu bisa ditengok dan diulang kembali. Organisasi itu pada dasarnya juga bersifat konservatif dan jarang yang mau mencoba-coba sesuatu yang baru, umumnya cukup senang dengan perubahan-perubahan kecil dan inkremental saja terhadap keputusan dan perilakunya dimasa lalu. Salah satu cara mengurangi kompleksitas dan ketidakpastian masalah yang dihadapi adalah dengan melakukan tindakan seperti tindakan-tindakan yang telah dilakukan sebelumnya. Organisasi juga cenderung memiliki pedoman, buku petunjuk, atau semacam itu yang berisi cara bagaimana organisasi seharusnya menyelesaikan persoalan. Seperti ditulis oleh Allison ketika ia membahas Model Proses Organisasi ini, apa yang akan terjadi pada suatu waktu bisa diramalkan dengan melihat apa yang telah terjadi pada waktu sebelumnya.

Untuk menyimpulkan pembahasan diatas bisa dikatakan bahwa pada dasarnya model ini mengajukan tiga proposisi. *Pertama*, suatu pemerintahan adalah terdiri dari sekumpulan organisasi-organisasi yang secara longgar bersekutu dalam struktur hubungan yang mirip struktur feodal. *Kedua*, keputusan dan perilaku pemerintah bukan hasil dari proses penetapan pilihan secara rasional, tetapi sebagai *output* atau hasil kerja organisasi-organisasi

besar yang bekerja menurut suatu pola perilaku baku. *Ketiga*, setiap organisasi, yang memiliki prosedur kerja baku dan program, serta bekerja secara rutin, umumnya akan berperilaku sama seperti perilakunya dimasa sebelumnya. Proses yang semi-mekanistik ini mempengaruhi keputusan yang dibuat maupun penerapan keputusan itu.

Studi politik luar negeri menurut model ini harus diarahkan untuk menelaah unit analisis berupa *output* organisasi-pemerintahan. Untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara menurut model ini, kita harus mengidentifikasi lembaga-lembaga pemerintah mana yang terlibat dan menunjukkan pola-pola perilaku organisasional yang melahirkan tindakan politik luar negeri itu.

Model III Politik-Birokratik

Dalam model ini politik luar negeri dipandang bukan sebagai hasil dari proses intelektual yang menghubungkan tujuan dan sarana secara rasional. Politik luar negeri adalah hasil dari interaksi, penyesuaian diri dan perpolitikan diantara berbagai aktor dan organisasi. Ini melibatkan berbagai permainan tawar-menawar (*bargaining games*) diantara pemain-pemain dalam birokrasi dan arena politik nasional. Dengan kata lain, pembuatan keputusan politik luar negeri adalah proses sosial, bukan proses intelektual.

Kalau proses pembuatan keputusan menurut Model I adalah proses intelektual, dan menurut Model II adalah proses mekanis, maka menurut Model III proses pembuatan keputusan adalah proses politik. Politik luar negeri muncul dari proses politik normal berupa tawar-menawar, kompromi, penyesuaian diri, dan sebagainya. Inilah inti "proses sosial" pembuatan keputusan. Sebagai analogi bisa dikatakan bahwa dalam Model I yang berperan adalah "manusia

ekonomi” yang rasional, sedang dalam Model III yang berperan adalah suatu proses sosial, yaitu mekanisme pasar.

Jadi, dalam Model III digambarkan suatu proses dimana masing-masing pemain berusaha bertindak secara rasional. Setiap pemain, seperti Presiden, para menteri, penasehat, jenderal, anggota parlemen dan lain-lainnya, berusaha menetapkan tujuan, menilai berbagai alternatif sarana dan menetapkan pilihan melalui suatu proses intelektual. dan tidak ada pemain yang bisa memperoleh semua yang diinginkan dalam proses *bargaining* ini.²²

Adapun maksud penelaah proses *Decision Making* adalah untuk mengetahui apa dan bagaimana proses keputusan mempengaruhi keputusan yang dihasilkan, yaitu menyangkut apakah proses pembuatan keputusan yang berbeda akan membuahkan hasil keputusan yang berbeda pula.²³ Sedangkan menurut James Dougherty dan Robert L. Pfalzgraff Jr., *Decision Making Theory* meliputi :

1. *The Studi of how decision supposedly are actually made; and.*
2. *Thecnique and criteria for the taking of decision by makers executive as achieve prescribes goals.*

Teori pembuatan keputusan yang diajukan oleh Dougherty meliputi bagaimana suatu keputusan dari para eksekutif digunakan untuk mencapai tujuan yang di tentukan. Jadi, esensi dari setiap pembuat keputusan adalah pemilihan diantara berbagai kemungkinan alternatif yang ada untuk kesinambungan suatu

²² Ibid. Hal 236.

²³ Mochtar Mas'ood. *Studi Ilmu Hubungan Internasional*. Tingkat Analisis dan Teorisasi, Yogyakarta PAU Studi Sosial UGM. 1989. Hal 116.

bangsa.²⁴ Disini penulis menambahkan dalam hal ini seorang polici maker yaitu Presiden Muhammad Khatami melakukan tindakan untuk merekonsiliasi hubungan politik dengan Rusia dikarenakan faktor kepentingan nasional.

Kebijakan Presiden Muhammad Khatami sebagai aktor unit analisa utama dalam decision making process. Korelasinya pada upaya penstabilan sistem politik di Iran.

Mengenai hal ini haruslah di tinjau dari banyak aspek, sehingga pengambilan keputusan tersebut merupakan pilihan dari akumulasi seluruh kepentingan nasional Iran.

Sebagai seorang yang merupakan aktor unit analisa utama, Presiden Muhammad Khatami, dalam menjalankan kebijakannya akan di pengaruhi oleh faktor-faktor organisasional, seperti : penetapan situasi, pencarian alternatif, dan pemilihan alternatif. Dalam menentukan faktor mana yang terpenting dalam setiap situasi. Penulis mencoba mengkaji unsur-unsur setiap definisi yang dianggap relevan dalam perumusan tindakan dan tujuan untuk permasalahan yang mempengaruhi kebijakan presiden Muhammad Khatami sebagai berikut :

1. Kebutuhan politik dalam negeri
2. Fenomena perhatian internasional
3. Pendapat publik
4. Kemampuan nasional
5. Tingkat ancaman dan kesempatan dalam setiap situasi.²⁵

²⁴ Abu Bakar Ebyhara, *Decision Making Teorys Hubungan Internasional*, Jurnal Umum Politik, LIPI, Jakarta, hal 9.

²⁵ Charles A. Mic Cleland, *Ilmu Hubungan Internasional, Teori dan Sistem*. CV. Rajawali, Jakarta. 1981, hal 10.

Karena keterikatan yang erat antara pengambilan keputusan dengan kebijakan maka penulis perlu untuk menjelaskan teori tentang kebijakan tersebut, yaitu : *"...apa saja yang hendak dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah"*. Sedangkan Richard Hogerbert mendefinisikan kebijakan sebagai berikut *"...produk yang kelihatan dari keputusan-keputusan yang di ambil oleh tokoh-tokoh yang mendefinisikan diri dengan cita-cita masyarakat"*.²⁶

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Muhammad Khatami tidak bisa dikatakan diambil oleh individunya sendiri karena Iran selain presiden yang memiliki kekuatan suara rakyat masih terdapat lagi yaitu Imam yang memiliki kedudukan tertinggi dalam pemerintahan. Demikian juga dalam mengantisipasi situasi Timur Tengah secara umum, maka Presiden Muhammad Khatami memilih alternatif untuk mengadakan rekonsiliasi politik dengan Rusia.

1.5 Hipotesa

Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, hipotesa merupakan sarana penelitian ilmiah yang penting dan tidak bisa ditinggalkan, karena merupakan instrumen kerja dari teori.²⁷ Sedangkan menurut Prof. Dr. Winarno Surachmad, hipotesa adalah perumusan jawaban sementara terhadap soal yang dimaksudkan sebagai tuntunan sementara dalam penyelidikan untuk mencari jawaban yang sebenarnya.²⁸

Berangkat dari permasalahan yang telah dirumuskan di atas dan berpijak pula pada teori-teori yang telah diajukan, maka penulis mencoba membuat konklusi sebagai jawaban yang sifatnya

²⁶ Thomas R. Dye *Understanding Public Policy*, Englewood Cliffs New Jersey : Prentice. 1978. Hal 3

²⁷ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *op.cit*: hal 43

²⁸ Dr. Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Riset: Pengantar Metodologi Ilmiah*, CV. Tarsito, Bandung, 1978, hal 107

sementara yang diharapkan sebagai jawaban dari masalah. Dalam hal ini formulasi hipotesa yang penulis ajukan adalah sikap Presiden Khatami melakukan rekonsiliasi (poros Teheran-Moskow) “karena tingkat ancaman dalam stabilitas regional yang sangat berdampak pada stabilitas nasional”.

1.6 Metode Penelitian

Penggunaan metode penelitian sangat bermanfaat untuk pembentukan kerangka berfikir dan pengolahan data yang telah didapat sehingga karya tulis ilmiah lebih sistematis dan kronologis. Menurut The Liang Gie, metode adalah cara atau langkah yang berulang-ulang kembali sehingga menjadi pola untuk menggali pengetahuan tentang suatu gejala. Pada ujung awalnya ini merupakan langkah mengumpulkan data yang pada akhirnya merupakan untuk memeriksa kebenaran dari pernyataan-pernyataan mengenai gejala tersebut.²⁹

1.6.1 Tehnik Pengumpulan Data

Adapun penulis melakukan observasi secara tidak langsung terhadap data-data yang ada pada lembaga atau perpustakaan yang kompeten dengan disiplin ilmu hubungan internasional. Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, kemampuan memanfaatkan perpustakaan harus dimulai dengan mengenal organisasi dan jenis koleksi perpustakaan serta memiliki pengetahuan tentang buku-buku referensi, yaitu mengenai ruang lingkup isi dan susunannya.

Lembaga-lembaga yang menjadi sumber pengumpulan data dan informasi karya tulis ilmiah ini adalah :

²⁹ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei* LP3IS, Jakarta, 1989, hal 12.

1. Perpustakaan FISIP Universitas Jember.
2. Perpustakaan Pusat Universitas Jember.
3. Perpustakaan dan Pusat Informasi CSIS Jakarta.
4. Perpustakaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Jakarta.
5. Perpustakaan Al-Hujjah Jember.

1.6.2 Tehnik Analisa Data

Penulis memilih menggunakan metode deduktif yang dikaitkan dengan analisa kualitatif, menurut penulis metode inilah yang paling sesuai dengan pembahasan permasalahan yang penulis sodorkan. Tehnik semacam ini menurut Drs. Sapari Imam Asyhari adalah cara memecahkan problematik yang berpijak dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.³⁰

1.7 Pendekatan

Pendekatan menurut The Liang Gie adalah

“Keseluruhan unsur yang dipakai untuk mendekati sasaran, memasuki suatu bidang ilmu pengetahuan dan memahami pengetahuan serta bulat mengenai sasaran yang ditelaah ilmu tersebut”.³¹

Penulis dalam karya tulis ilmiah ini menggunakan pendekatan sejarah politik (*political-history aproach*). Menurut Charles Eisenmen, *political-history aproach* adalah :

“In the last resort, in the cronological description of political facts of every kind, wether institutional or even non institutional, in the

³⁰ Sapari Imam Asyhari, *Metode Penelitian Sosial*, Usaha Nasional Surabaya, 1981, hal 32

³¹ The Liang Gie, *op.cit*, hal 65

live of state (or a political society) considered separately (or societies)".³²

Pendekatan ini penulis gunakan agar permasalahan perubahan politik luar negeri Iran dapat dijabarkan dengan pemahaman yang menyeluruh mengenai persoalan yang telah lampau. Analisis dilakukan dari berbagai sudut pandang sehingga diharapkan jawaban yang dimunculkan untuk menjawab permasalahan utama dapat semaksimal mungkin mendekati titik objektivitas.



³² Ibid, hal 65

BAB II

Gambaran Umum Republik Islam Iran

2.1 Karakteristik Republik Islam Iran

Iran merupakan sebuah negara dengan posisi yang sangat strategis. Luas wilayahnya sekitar 1.648.195 kilometer (638.296 mil) persegi, sehingga menjadikan Iran sebagai negara terluas ke-16 di dunia. Batas-batas negara Iran dengan tetangganya terdiri dari 5.170 kilometer garis batas daratan dan 2.110 kilometer garis batas air sehingga menjadikan Iran sebagai negara yang mempunyai garis batas terpanjang. Garis batas yang terpanjang (hampir seluruhnya) terletak di sebelah utara yaitu berbatasan dengan Uni Soviet sepanjang 1.740 kilometer sebagai daerah perbatasan bersama, termasuk 630 kilometer batas air. Daerah perbatasan Irak dengan Iran, di sebelah barat daya sepanjang 1.280 kilometer, dengan Afganistan di timur laut, Iran bertatap batas sepanjang 850 kilometer, sedangkan dengan Pakistan sepanjang 830 kilometer. Teluk Persia dan Laut Oman terletak di selatan, secara geopolitis Iran dikelilingi oleh negara-negara penting di kawasan benua Asia dan Eropa seperti Turki, Rusia, Afganistan, Pakistan, dan Irak.¹

2.1.1 Sejarah Negara Iran

Posisi negara Iran yang strategis, menjadikannya sebagai negara penting bagi strategi global negara-negara besar, baik dari segi politik maupun ekonomi. Hal ini disebabkan Iran berada di jalur pelayaran internasional yang menjadi suplai minyak negara Timur

¹ Riza Sihbudi, et.al. Profil Negara-Negara Timur Tengah, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, hal 72.

Tengah ke negara-negara lain.² Kenyataan ini yang menjadikan Iran sebagai suatu bangsa yang mempunyai perjalanan sejarah yang panjang sampai dengan keberadaannya saat ini. Panjangnya sejarah Iran dan waktu yang ditempuh untuk menjadikan perubahan itulah yang menjadikan sosok negara Iran menjadi sosok kekuatan politik yang disegani di kawasan Timur Tengah.

Perjalanan sejarah Iran telah melalui masa-masa yang sangat berbeda baik karakter, gaya kepemimpinan maupun sistem pemerintahannya. Nasir Tamara membagi sejarah Iran menjadi dua bagian yang masing-masing terdiri dari kurun waktu 12 abad dan 13 abad. Dua belas abad pertama adalah masa sebelum masuknya Islam yang ditandai dengan berkuasanya dua dinasti besar yaitu Achemenide dan Sassanide. Abad kedua ialah masa pasca masuknya Islam yang terjadi mulai tahun 640 Masehi.³

Beberapa ahli seperti Riza Sihbudi dkk, membagi beberapa masa yang dialami Iran, yaitu masa pra Islam, dan masa awal masuknya Islam.

2.1.2 Masa Pra Islam

Pada masa sebelum abad 20, Iran bernama Persia atau Porsi, namun kemudian pada pertengahan pertama abad keenam sebelum Masehi, Cyrus Agung mempersatukan orang-orang Persia dan Medes ke dalam kerajaan Persia Raya yang pertama. Cyrus Agung memproklamirkan dirinya sebagai raja Persia pada tahun 546 SM dan dikenal sebagai pendiri kerajaan Persia. Cyrus Agung meninggal pada 529 SM dan setelahnya keluarga Cyrus Agung secara turun temurun memerintah sehingga membentuk Dinasti Achemenide (550

² Ibid, hal 73

³ Nasir Tamara, Revolusi Islam, Sinar Harapan, Jakarta, 1980, hal 23.

SM-330 SM). Setelah itu, kekuasaannya diteruskan oleh Darrius I. Ia mengorganisir kerajaannya dalam puluhan wilayah besar (Sastrapies) yang dihubungkan dengan jalan raya sehingga komunikasi dan persatuan politik di masa itu dapat berjalan lancar.⁴

Kejatuhan Dinasti Achemenide dimulai dari kekalahan besar melawan pasukan Yunani (490 SM) di daerah Marathon dan sepuluh tahun kemudian di daerah Salamis, Achemenide juga mengalami kekalahan. Lalu bala tentara Iskandar Agung yang mengalahkan pasukan Persia di daerah Arbelia (331 SM). Iskandar Agung yang mengangkat dirinya sebagai pemimpin kerajaan Persia mengawali suatu periode pemerintahan imperial asing.

Setelah Iskandar Agung meninggal, Persia dipimpin oleh Jenderal Seleucus yang kemudian mendirikan Seleucid. Dinasti ini berkuasa pada 247 SM, yaitu ketika Persia jatuh ke tangan Kerajaan Parthian (*Parthian Empire*) dari daerah Arsacids yang memerintah hampir 500 tahun. Tahun 22 Masehi, Persia diperintah oleh Dinasti Sassanide yang berasal dari daerah Farsi. Mereka memerintah sampai abad ke tujuh. Di bawah kekuasaan Dinasti Sassanide, Zoroaster dijadikan sebagai agama resmi Persia.⁵

Setelah pasukan Arab mengalahkan pasukan Persia dalam peperangan di Nehavand (Tahun 642), Islam menjadi agama resmi Persia menggantikan Zoroaster. Dengan berpindahnya kekhalifahan Islam dari Damaskus ke Baghdad (Tahun 750), budaya Persia menjadi sangat dipengaruhi oleh peradaban Arab-Islam. Kekuasaan Arab berakhir pada abad ke tiga belas dengan terjadinya invasi pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagukhan dan sejak itulah Persia kembali diperintah oleh para penguasa asing. Selama 250

⁴ Nasir Tamara, op. Cit, hal 23.

⁵ Riza Sihbudi, et. al. op. Cit, hal 74.

tahun Hulagukhan, seorang Budhist, namun Islam tidak diganggu bahkan semakin semakin berkembang sehingga agama Islam semakin meluas ke seluruh wilayah kerajaan.

2.2 Masa Awal Masuknya Islam

Beberapa literatur menunjukkan bahwa Islam masuk ke Persia tidak serta merta diawali dengan perebutan kekuasaan. Pada awalnya hanya bersifat penyebaran agama yang semakin lama menjadi semakin berkembang. Hal ini tampak pada tahun 640 Masehi, sementara raja terakhir Dinasti Sassanide berakhir pada 651 Masehi.⁶ Namun dalam literatur lain dinyatakan bahwa adanya peperangan antara pasukan Arab dengan Persia di Nehavand (Tahun 642 M) dan setelah itu Islam menjadi agama resmi di Persia menggantikan Zoroaster.⁷

Terdapat fakta yang menunjukkan bahwa Husein (cucu dari nabi Muhammad SAW) menikah dengan putri keturunan kerajaan Sassanide. Pernikahan ini menjadikan Husein sebagai bapak dan penerus kerajaan Persia. Ia meninggal secara tragis pada saat melawan raja Ommayade di bawah pimpinan khalifah Yazid di padang pasir Karbala. Sejak saat itu tradisi Syi'ah lahir.⁸ Tradisi ini ditandai dengan memunculkan acara ritual keagamaan untuk memperingati meninggalnya Husein (Imam Syi'ah ketiga) dengan jalan menangis, memukul-mukul badan hingga melukai dirinya sendiri.⁹ Disebutkan pula bahwa tradisi ini sebagai bentuk penentangan kepada kekhalifahan selain Ali (dan

⁶ Ibid, hal 74.

⁷ Nasir Tamara, op. Cit, hal 26

⁸ Ahmad Zein Alkaff, Mengenal Syi'ah, Yayasan Al Hujjah, Jember, 1994, hal 91.

⁹ A.Rahman Zainudin, Syi'ah Dan Politik di Indonesia, Mizan, Bandung, 2000, hal 77.

keturunannya) serta mengutuk pasukan Yazid yang melawan Husein di Karbala.¹⁰

2.2.1 Masa Dinasti Safawi Dan Qajar

Negara Islam tradisional dibangun atas dasar struktur kekuasaan yang absolut dimana para raja atau shah memiliki otoritas politik yang sangat besar. Tetapi struktur negara absolut mulai memudar (*des integrate*) pada masa kekuasaan Dinasti Qajar (1796-1925), baik karena faktor-faktor intern maupun ekstern. Meningkatnya penetrasi kekuatan barat mengakibatkan bangkitnya golongan ulama sebagai kekuatan oposisi yang utama terhadap monarki. Akibat lain dari meningkatnya kontak dengan barat adalah munculnya cendekiawan modern dengan sendirinya menjadi tantangan baru bagi tatanan tradisional. Peristiwa penting yang terjadi pada masa Dinasti Qajar adalah Revolusi Konstitusional yang mengakhiri kekuasaan absolut raja.¹¹

Dinasti Safawi (yang berkuasa mulai 1501- 1722) merupakan peletak dasar bagi negara Persia modern. Salah satu raja yang terkenal pada masa kekuasaan Dinasti Safawi adalah raja Ismail Safawi (berkuasa pada tahun 1501-1524). Di bawah kekuasaannya, Islam mazhab Syi'ah Imamiyah diakui sebagai agama negara untuk pertama kalinya. Kekuasaan Dinasti Safawi berakhir pada tahun 1722. Antara tahun 1722 hingga 1779, Persia berturut-turut berada di bawah kekuasaan; Kaum Sunni Afghan(1722-1736), Nader Shah Afshar Khan Zand yang berkuasa sejak pertengahan tahun 1760-an sampai 1779, yang kesemuanya itu bisa dikatakan sebagai masa

¹⁰ Riza Sihbudi, op. Cit, hal 75

¹¹ Ibid, hal 75.

transisi karena sejak 1794 hingga 1925 kekuasaan berada di tangan Dinasti Qajar.¹²

Pada masa Dinasti Qajar inilah, yaitu pada abad kesembilan belas dan awal abad dua puluh, Persia menjadi permainan negara-negara besar yang saling bersaing terutama antara Inggris dan Rusia.

2.2.2 Dinasti Pahlevi

Pada bulan Februari 1921, Komandan Brigade Cossack, Reza Shah Pahlevi dan seorang intelektual muda nasionalis, Zia ed-Aiz Tabatabai, mengotaki suatu kudeta sehingga berhasil menaikkan mereka ke puncak kekuasaan. Setelah itu Zia menjadi perdana menteri sedangkan Reza Shah Pahlevi menjadi menteri peperangan merangkap komandan angkatan bersenjata. Namun pada tahun 1923, Reza berhasil menyingkirkan Zia dan memaksa Shah Ahmad “berlibur panjang” di Eropa sejak 1925 dan dimulailah masa pemerintahan Dinasti Pahlevi di Persia dengan Reza Shah Pahlevi sebagai raja pertamanya. Reza Shah Pahlevi banyak melakukan perubahan di segala bidang termasuk di bidang hukum, yang tentu saja mendapat tentangan dari para kaum ulama.

Reza Shah Pahlevi memerintah dengan otoriter sehingga kekuasaannya tidak berlangsung lama (1925-1941). Kekuasaannya berakhir tepat pada 16 September 1941, yaitu pada permulaan berkobarnya Perang Dunia II, karena itu ia bersimpati pada Jerman. Namun kemudian Iran diduduki oleh pasukan sekutu dan Reza Shah Pahlevi dipaksa turun tahta oleh pasukan-pasukan Inggris dan Rusia yang kembali memasuki Iran dengan dalih Iran telah berpihak pada Jerman. Pada tahun 1941 pasukan sekutu (Inggris dan Rusia)

¹² Ibid, hal 76.

menobatkan Muhammad Reza Pahlevi, anak dari Reza Shah Pahlevi, sebagai raja kedua sekaligus terakhir dari dinasti Pahlevi.¹³

2.3 Berakhirnya Sistem Monarkhi

Sejak tahun 1971, terlihat tanda-tanda keruntuhan Shah, yaitu ketika pada bulan Oktober Shah menyelenggarakan pesta besar-besaran untuk memperingati ulang tahun ke-2500 berdirinya kerajaan Persia. Pesta besar yang diadakan di atas reruntuhan kota Persopolis yang dibangun oleh Raja Darrius itu juga dimaksudkan untuk merayakan ulang tahun ke-50 berdirinya Dinasti Pahlevi dan ulang tahun ke-30 naiknya Shah ke tahta merah, serta ulang tahun ke-10 reformasi yang oleh Shah disebut sebagai revolusi putih.

Untuk pengadaan pesta itu Shah menghambur-hamburkan dana sekitar 300 juta dollar AS pertahun. Padahal pendapatan per kapita rakyat Iran hanya 500 dollar per tahun. Tindakan ini dikecam habis oleh Imam Khumaini yang pada akhirnya diikuti oleh para Mullah dan rakyat jelata.

Kota suci Qum (9 Januari 1948) merupakan awal dari pergolakan panjang yang meruntuhkan seluruh sendi kekuasaan Shah.¹⁴ Setelah itu terbentuklah sendi-sendi pemerintahan di bawah kaum Mullah di bawah pimpinan Imam Khumaini.

2.4 Berdirinya Republik Islam Iran

Dapat disebutkan bahwa peringatan syahidnya Ayatullah Mustofa Khumaini pada 23 Oktober 1977 sebagai titik awal

¹³ Ibid, hal 78.

¹⁴ Ibid, hal 79-81.

kebangkitan revolusi Imam Khumaini dan para Shah Islam sebelumnya, seperti Ayatullah Kasyawi, Mudarris, dan Syeik Fadlulah Nuri.

Peringatan yang dimaksudkan sebagai upacara mengenang putra Imam itu berubah menjadi kritik pedas kepada kebijakan-kebijakan rezim Pahlevi yang anti Islam dan memperlakukan ulama dengan semena-mena. Imam Khumaini, melalui tulisan yang dimuat dalam harian Utila'at edisi Januari 1978 memberikan gambaran betapa besarnya kemarahan kaum ulama bersama rakyat. Akibat dari hal tersebut rakyat marah besar dan pada 9 Januari 1978 mahasiswa dan kaum agama yang berada di Qum turun ke jalan menentang rezim. Dalam peristiwa ini beberapa orang menjadi korban meninggal dunia dan luka-luka. Tetapi, seperti diatur oleh Tuhan, kesyahidan sejumlah mahasiswa tersebut justru memicu pergolakan panjang dan meluas ke seantero Iran yang kemudian berhasil meruntuhkan Dinasti Pahlevi dan menaikkan pemerintahan Islam di bawah pimpinan Imam Agung Ayatullah Ruhullah Khumaini.

Selama perjalanan Revolusi Islam (1978-1979) itu, Imam selalu mengingatkan rakyat Islam Iran melalui pesan-pesan baik dalam bentuk cetakan maupun kaset-kaset yang diselundupkan ke Iran dan disebarluaskan oleh para pejuang agar selalu tabah dan kuat menghadapi kebiadaban dan ketidakadilan Shah.

Shah yang melihat dirinya dalam keadaan berbahaya, akhirnya menekan Irak agar mengusir Imam Khumaini dari Najaf, sehingga pada 24 September 1978, Imam meninggalkan Irak menuju Kuwait, tetapi Kuwait menolak sehingga Imam memutuskan untuk ke Paris, Perancis.

Di Perancis, Imam menetap di Nealepehle-Le Chateau, dekat kota Paris dan melanjutkan perjuangannya untuk meruntuhkan rezim Pahlevi. Sementara itu Shah mengira bahwa jauhnya jarak antara Perancis dan Iran akan meredam perlawanan rakyat, tetapi kenyataannya adalah rakyat semakin menggebu-gebu untuk mengadakan perlawanan menentang rezim Pahlevi.

Setelah menetap selama kurang lebih empat bulan di Perancis, Imam melihat bahwa sesungguhnya rezim Pahlevi sudah tidak diakui lagi oleh rakyat, meski secara legal formal pemerintahan Iran masih aktif dan pada saat yang sama, rakyat sangat mendambakan kehadiran Imam di tengah-tengah mereka, sehingga hal inilah yang menjadi alasan Imam untuk kembali ke Iran.

Tanggal 1 Februari 1979 Imam menapakkan kakinya kembali di Iran. Dari bandara Mehrabad, Teheran, Imam langsung menuju ke pemakaman Behesyte Zahra untuk memberikan pidato bersejarahnya di hadapan jutaan manusia yang mengelu-elukan pemimpin yang sangat mereka cintai. Hanya berselang sepuluh hari dari kedatangan Imam ke Iran, yaitu pada 11 Februari 1979, Dinasti Pahlevi runtuh dan berdirilah negara Islam Iran di bawah kepemimpinan Imam Khomeini.

Pada 1 April 1979, rakyat diminta memberikan suaranya melalui referendum nasional, setuju atau tidak terhadap pemerintahan republik Islam. Ternyata 98,2 % rakyat secara bulat memberikan suara setuju sehingga dengan demikian secara resmi berdirilah negara Republik Islam Iran pada 1 April 1979.¹⁵

¹⁵ Imam Khomeini, *Pandangan Hidup dan Perjuangan*, Al Hujjah, Jember, 2000, hal 16-20.

Penyebab utama berhasilnya revolusi Islam Iran dikarenakan oleh perubahan yang dilakukan Shah Reza Pahlevi secara revolusioner. Shah ingin meniru barat dengan segala kemajuan di segala bidang, sehingga pada waktu itu, bersamaan dengan perayaan besar-besaran untuk memperingati hari bersejarah keluarga Shah, Iran memungut pajak yang sangat berlebihan pada rakyat, sedangkan rakyat Iran masih belum mampu meniru barat dan kondisi ekonomi yang terpuruk, membuat rakyat memberontak atas segala kebijakan Shah di bawah pimpinan kaum Mullah.

2.4.1 Figur Pendiri Republik Islam Iran

Imam Khumaini lahir pada 20 Januari akhir 1320 atau 24 September 1902 Masehi di kota Khumain, 349 Kilometer barat daya Teheran dalam sebuah keluarga yang terkenal dengan keilmuan, keutamaan, dan kesalihan. Ayahnya, Ayatullah Sayyid Mustofa al Musawi adalah seorang ulama ternama dan tokoh terkemuka di Khumain. Sementara ibunya, Sayyidina Hajar adalah cucu ulama terkenal pada jamannya yaitu Ayatullah al Khumsari, penulis kitab Zubdah al Tasharif.

Baik dari segi keturunan orang tua laki-laki maupun perempuan, Imam Khumaini yang nama lengkapnya adalah Sayyid Ruhullah al Musawi al Khumaini adalah keturunan langsung Rasulullah Muhammad SAW dari jalur Sayyidina Fatimah al Zahra dan Imam Ali bin Abu Thalib a.s.

Pada usia lima bulan, tepatnya pada 11 Zulkaidah 1320 H, Imam Khumaini harus kehilangan ayahnya yang syahid di tangan agen-agen pemerintahan Dinasti Qajar yang berang atas tindakannya yang selalu membela rakyat. Pada usia lima belas tahun, ibunya meninggal dan setelah itu Imam Khumaini diasuh oleh bibinya Sahibah Hanum yang kemudian juga meninggal. Imam Khumaini

kemudian tinggal bersama kakaknya, Ayatullah Sayyid Muttadha Pasandideh.¹⁶

2.4.2 Pendidikan Imam Khomeini

Pada masa kanak-kanak di bawah bimbingan keluarga dan lingkungan cendekiawan muslim, Imam telah mendapatkan pelajaran Al Qur'an dan baca tulis bahasa Arab dan Persia serta ditambah lagi ilmu Fiqh, Mantiq, dan kemudian Ushul Fiqh.

Pada usia 19 tahun, Imam merantau ke kota Arak dan di kota ini Imam berguru pada Ayatullah Abdul Karim Hairi. Ayatullah Hairi kemudian pindah ke kota Qum untuk melanjutkan sekaligus mengembangkan ilmu pendidikan. Demi syiar Islam, langkah sang guru ini pun diikuti oleh Khumaini kemudian Ayatullah Hairi pun membentuk Pusat Studi Islam, Hauzah Ilmiah.

Tercatat dalam sejarah para guru Imam Khumaini sewaktu menuntut ilmu adalah sebagai berikut :

1. Ayatullah Syeik Abdul Karim Hairi, guru utama bidang Fiqh dan Ushul Fiqh
2. Ayatullah Mirza Muhammad Ali Syah Abadi, guru utama bidang Irfan atau Tassawuf.¹⁷

Sedangkan untuk ilmu lain seperti filsafat, astronomi, dan riyadiyyat juga berguru pada kedua guru utama tersebut, dan guru khusus di bidang lain tidak disebutkan di dalamnya.

2.4.3 Perjalanan Hidup Imam Khomeini Di Masa Perjuangannya.

- a. Pembuangan ke Turki

¹⁶ Ibid, hal 3.

¹⁷ Ibid, hal 5.

Tanggal 23 Oktober 1964,* Shah memaksa kepada segenap rakyatnya untuk melaksanakan perayaan ulang tahun Syah dan sekali lagi Imam Khumaini melancarkan serangan sangat keras untuk menolak hal tersebut. Namun pada 4 Nofember1964, Syah bekerja sama dengan Amerika Serikat sehingga menyebabkan Imam dibuang di Turki.

Selama di Turki, Imam diawasi dengan ketat oleh dinas rahasia Turki yang bekerja sama dengan Savak Iran. Imam Khumaini tidak boleh meninggalkan desa pembuangannya itu dan bahkan dilarang untuk mengenakan baju keagamaan.¹⁸

b. Pembuangan ke Irak.

Setelah menetap kurang lebih 11 bulan di Turki, Imam akhirnya diperbolehkan untuk meninggalkan Turki akan tetapi tidak diperkenankan untuk kembali ke Iran. Imam Khumaini berpindah ke kota Najaf, Irak. Disini Imam Khumaini manawarkan solusi atas problematika yang melanda Iran melalui konsep pemerintahan Islamnya yang dikenal dengan pemerintahan Wilayatul Faqih, karena hanya dengan Islamlah sebuah negara bisa mencapai kemakmuran.¹⁹

2.5 Sejarah Aliran Islam Syi'ah Sebagai Agama Yang Dianut Oleh Negara Islam Iran.

Secara morfologis, kata Syi'ah berasal dari bahasa Arab yang berarti pengikut, juga bermakna lain, yaitu pendukung atau pencinta dan dapat pula diartikan sebagai kelompok. Sedangkan pengertian Syi'ah menurut istilah, Syi'ah Imamiyah Istmi Asyariyyah adalah aliran yang meyakini Ali r.a sebagai pemimpin pasca Nabi Muhammad SAW wafat. Didalam buku lain disebutkan pula bahwa

¹⁸ Ibid, hal 13.

¹⁹ A.Rahman Zainudin, Syi'ah dan Politik di Indonesia, Mizan, Bandung, 2000, hal 39.

Syi'ah berarti kelompok yang percaya bahwa sebelumnya, Nabi Muhammad SAW telah menentukan siapa yang akan menggantikannya. Pengganti itu adalah Ali r.a yang merupakan saudara sepupu sekaligus menantunya sendiri karena beristrikan anak perempuannya yaitu Fatimah r.a.²⁰

Keyakinan kelompok Syi'ah ini mengikuti Ali r.a berdasarkan peristiwa Haji Wada', pada 18 Dzulhijjah, tahun kesebelas Hijriah (632 M), di suatu tempat yang bernama Qhadir Khummu, dimana nabi mengeluarkan pernyataan bahwa barang siapa menganggap Nabi Muhammad SAW. sebagai pemimpin, maka hendaklah menganggap Ali r.a sebagai pemimpin pula.²¹

Dalam versi lain disebutkan bahwa nabi telah menunjuk orang yang menurut beliau sesuai dan memenuhi kualifikasi guru rohani dan sekaligus pemimpin umat. Pilihan tersebut ternyata jatuh pada Ali r.a yang diungkapkan oleh nabi, "Inilah saudaraku, wasiatku, dan khalifahku untukmu. Dengarkan dia dan taatilah dia".²²

Terdapat kelompok penentang terpilihnya Ali r.a sebagai pemimpin pasca nabi, yaitu golongan Sunni (*Ahlus Sunnah al Jama'ah*) maupun dari kelompok Abbasiyah r.a yang masing-masing golongan memiliki dasar-dasar yang kuat pula. Untuk itu tidak dibenarkan untuk menghakimi sebuah perdebatan di masa lampau yang masing-masing pihak bertujuan untuk memakmurkan Islam.

2.5.1 Al-Imamah

Imamah merupakan satu hal yang paling pokok dalam konsep teologi madzhab Syiah. Di dalam bukunya Ahamd Zein Alkaff

²⁰ Hamid Enayat, *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah*, Pustaka, Bandung, 1988, hal 6.

²¹ A Rahman Zainudin, *op Cit*, hal 39.

²² Abdullah Al Khatib dan Ihsan Ikhy Dzahid, *Perbandingan Sunnah dan Syi'ah*, CV Pustaka Mantiq, Solo, 1997, hal 31

menyatakan bahwa Imamah adalah salah satu rukun iman bagi aliran Syiah Imamah Itsna Asyariyyah. Rukun iman tersebut secara berurutan adalah Tauhid, Nubuwwah, Al-Imamah, Al-Adlu, Al-Maad.²³ Hal ini merupakan perbedaan secara khusus antara kaum syiah dengan madzhab Sunni ataupun madzhab-madzhab Islam lainnya.²⁴ Sementara itu K.H. Muh. Dawam Anwar dalam seminar nasional tentang Syiah mengungkapkan bahwa Imamah adalah termasuk Ushuluddin (keyakinan pokok) dalam keyakinan Syiah, atau salah satu rukun dari rukun agama. Barang siapa yang ingkar terhadap Imamah maka dia akan menjadi kafir.²⁵ Hal yang sama diungkapkan pula oleh seorang peneliti dalam laporan penelitiannya, H.M. Suparta dalam laporan penelitiannya menyatakan pembahasan Imamah merupakan suatu hal yang sangat penting karena selain rukun iman juga menyangkut tegak dan berlangsungnya kepemimpinan Syiah.²⁶

Rahman Zaenuddin dalam bukunya menyatakan bahwa kaum Syiah meyakini yang berhak atas otoritas spiritual dan politik dalam komunitas Islam pasca nabi Muhammad adalah Ali Ibnu Abi Tholib beserta sebelas keturunannya, yaitu :

1. Hasan ibn Ali (Al-Mujtaba)
2. Husain ibn Ali (Sayyid Al-Syuhada)
3. Ali Husain (Zain Al-Abidin)
4. Muhammad ibn Ali (Al-Baqir)
5. Ja'far ibn Muhammad (Al-Shadiq)

²³ Al-Khulaini, "Al-Kaafi", dalam Ahmad Zen Alkaff, *op.cit*, hal.51

²⁴ Jalaluddin Rahmat, *op.cit*, hal 249

²⁵ Muh. Dawam Anwar, *Mengapa kita menolak Syiah*, I.IPI, Jakarta, 1997, hal.13

²⁶ H.M. Suparta, *Murtadla Muthahari : aktivitas dan pemikirannya*, laporan penelitian IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1999, hal.29

6. Musa ibn Ja'far (Al-Kazhim)
7. Ali ibn Musa (Al-Ridha)
8. Muhammad ibn Ali (Al-Jawwad)
9. Ali ibn Muhammad (Al-Hadi)
10. Hasan ibn Muhammad (Al-Askari)
11. Muhammad ibn Hasan (Al-Qa'im) juga dikenal sebagai Imam Mahdi Al-Muntadhar atau Imam Zaman.²⁷

Kedudukan Imam di mata kaum Syiah merupakan kedudukan yang mulia. Imam bersifat *ma'shum* (tidak pernah melakukan dosa besar, tidak pernah melakukan kesalahan bahkan lupa pun tidak). Imam dapat menerima wahyu dari Allah.²⁸ Ayatullah Khomeini sendiri menilai Imam memiliki kedudukan atau martabat yang tidak dapat dicapai para malaikat maupun para nabi yang diutus Allah selain nabi Muhammad saw.²⁹ Jallaluddin Rahmat juga sependapat, menurutnya Imam merupakan pilihan Tuhan yang paling berilmu terpelihara dari dosa, dan berakhlak mulia.³⁰

Hal yang paling menarik dari prinsip Imamah kaum Syiah adalah keyakinannya bahwa Imam terakhir bersembunyi atau menghilang didalam gua Sarro Man Roa, dan akan muncul kembali.³¹ Kemunculan Imam yang kedua belas ini menurut penulis adalah ketika Da'jal muncul dan menjerumuskan umat manusia pada perbuatan-perbuatan jahiliyah. Jallaluddin Rahmat menyatakan pula bahwa Imam kedua belas dalam keadaan ghaib.³²

²⁷ A. Rahman Zainuddin, *op.cit*, hal.54

²⁸ Al-Kulaini, "Al-kaafi", dalam *Mengapa Kita Menolak Syiah*, Muh. Dawam Anwar, *op.cit*, hal.14

²⁹ Ayatullah Ruhullah Khomeini, *Hukumah Al-Islamiah*, dalam Ahmad Zein Al-Kaff, *op.cit*, hal.32

³⁰ Jallaluddin Rahmat, *op.cit*, hal.244

³¹ Ahmad Zein Al-Kaff, *op.cit*, hal.83

³² Jallaluddin Rahmat, *op.cit*, hal.244

Fenomena gaibnya Imam kedua belas, diyakini madzhab Syiah terdiri dari 2 tingkatan, yaitu :

1. *Ghaibah Sughra* (Kegaiban Kecil atau *Minor Occultation*)

Hal ini terjadi karena Imam Mahdi (Imam ke 12) bersembunyi di dunia fisik dan mewakilkan kepemimpinannya kepada para wakil Imam. Pada masa ini kesulitan dalam hal *Marja'* (kepemimpinan agama dan politik) relatif bisa diatasi, karena posisi *Marja'* dijabat oleh 4 wakil Al-Mahdi. Mereka adalah Abu Amr Ustman, Abu Ja'far Muhammad, Abu Al-Qaim Al-Husain, dan Abu Al-hasan Ali.

2. *Ghaibah Kubra* (Kegaiban Besar atau *Major Occultation*)

Masa sesudah meninggalnya keempat wakil Imam sampai kedatangan kembali Al-Mahdi pada akhir zaman. Pada masa inilah konsep Khomeini melalui Wilayatul Faqih ditempatkan.³³

Ayatullah Khomaeni sendiri menilai imam memiliki kedudukan yang tidak dapat dicapai oleh para malaikat maupun nabi-nabi yang diutus Allah.³⁴

2.6 Konsep Pemerintahan Dengan Prinsip Wilayatul Faqih

Perubahan global yang terjadi di Iran akibat adanya revolusi Islam yang dilakukan Imam Khomeini tidak dapat dihindarkan. Revolusi Islam telah menjadikan akhir sistem pemerintahan monarchi di gantikan dengan bentuk negara republik yang didasarkan pada ajaran Islam. Hal ini merupakan sebuah momentum yang tetap bagi Imam Khomeini untuk menerapkan gagasannya selama ini yakni terbentuknya sebuah pemerintahan Islam dibawah pimpinan para ulama ahli fiqih. Gaya pemerintahan yang selama ini telah populer disebut dengan gaya pemerintahan Wilayatul Faqih.

³³ A. Rahman Zainuddin, *op.cit*, hal.57

³⁴ Ayatullah Khomaeni, *Hukumah Al Islamiyah*, *op.cit*, hal 32



Kekuasaan pada masa pemerintahan Imam Khomeini memiliki ciri khas tersendiri. Ciri khas tersebut dikarenakan penafsiran eksistensi konsep wilayatul adalah sebuah pemerintahan yang tunduk pada hukum Islam yang berasal dari Tuhan dan utusanNya, bukan hukum yang dibuat rakyat atau wakil mereka.³⁵ Imam Khomeini, dan juga ahli ideologi Islam Mawlana Mawdudi dari jamaat-i-Islam dan Hasan Al-Banna dari Ikhwan, memiliki fisi Islam yang menyeluruh :

Islam mempunyai suatu sistem dan program bagi semua urusan dalam masyarakat : bentuk pemerintahan dan administrasi, peraturan untuk urusan dikalangan masyarakat, hubungan antara negara dan rakyat, hubungan dengan negara asing, dan semua urusan ekonomi dan politik ...Masjid selalu merupakan pusat kepemimpinan dan komando, penelitian dan penganalisisan masalah-masalah sosial.³⁶

Untuk urusan di dunia internasional sewaktu Imam Khomeini berkuasa, ia memiliki pandangan bahwa kekuatan di dunia ini terbagi menjadi dua kelompok besar. Yaitu kelompok Timur yang di pimpin oleh Uni Soviet dengan ideologi komunis beserta para sekutunya yang beraliran komunis maupun sosialis. Sedangkan kelompok Barat di pimpin oleh Amerika Serikat dengan ideologi liberalis. Dan kelompok tengah sebagai kelompok tertindas dan netral adalah negara-negara dunia ketiga serta negara-negara Islam.³⁷ Mayoritas pemerintah didunia Islam dan dunia ketiga pada umumnya di pandang sebagai negara-negara klien, budak barat dan timur. Karena itu slogan revolusi adalah "Bukan timur dan bukan

³⁵ M. Rizal Sihbudi, *op.cit.* hal.53

³⁶ Ruhullah Khomeini, *Islam and Revolution : writing and declarations of Imam Khomeini Berkeley Calif: Mizan Press, 1981, hal.249 - 250*

³⁷ Untuk analisis mengenai pandangan Khomeini, lihat Farhang Rajae, *Islamic Values and the world : Khomeini on man, the state and international politic (Washington DC, University Press of America 1983)*

juga barat hanya Islam semata. Dalam bahasa arab ungkapan ini di kenal dengan : *La Sarkiyyah, La Gharbiyyah Jumhuriyyah Islamiyyah-Islamiyyah*".³⁸

2.7. Komponen-Komponen Pemerintahan di Iran

Struktur politik Iran mengalami perubahan secara besar-besaran sejak berakhirnya kekuasaan Shah. Bentuk negara berubah dari monarkhi absolut dimana Shah berkuasa secara penuh menjadi republik yang berdasarkan pada ajaran agama mazhab Syi'ah.

Bentuk Republik Islam secara resmi disetujui mayoritas rakyat Iran (98,2%) melalui referendum nasional, sedangkan UUD Republik Islam Iran disetujui mayoritas rakyat Iran (99,5%) melalui referendum yang dilaksanakan pada 3 Desember 1979. Kekuasaan tertinggi dalam struktur politik Republik Islam Iran berada di tangan Imam (pemimpin) atau Dewan Kepemimpinan (*Shura-ye Rahbani*). Hal ini memang sesuai dengan ajaran mazhab Syi'ah yang menerapkan prinsip imamah (keimaman) sebagai salah satu ajaran utamanya.³⁹

Kekuasaan di Iran masa Khomaeni memiliki ciri khas tersendiri. Disamping Fuqaha sebagai penguasa tertinggi, terdapat pula 3 lembaga legislatif. Lembaga ini hanya bersifat menangani kekuasaan legislatif tanpa boleh diartikan menguasai bidang legislatif karena hukum yang berlaku hanya milik Allah SWT. Karena itu pemerintahan Islam di Iran dapat diartikan sebagai hukum Allah atas manusia.⁴⁰

³⁸ John L. Esposito, *Ancaman Islam Mitos atau Realitas ?*, edisi revisi : menggugat tesis Huintinton, Mizan, Bandung, 1996, hal.121

³⁹ Sihbudi, Reza dkk. *Profil Negara-Negara Timur Tengah*. Pustaka Jaya. Jakarta, 1995, hal 92.

⁴⁰ Antara, 5 Juni 1989

Lembaga legislatif pertama adalah *Majles-e-Shura-e-Islami* (majelis konsultasi Islam) yang berfungsi sebagai parlemen yang bertugas menyusun program berdasarkan ajaran Islam dan menentukan bentuk pelayanan pemerintah di seluruh negeri. Lembaga ini terdiri atas 270 anggota yang dipilih melalui pemilihan umum. Lembaga kedua adalah *Shuraye-Nigahban* (dewan perwalian) yang memiliki tugas menjamin agar keputusan-keputusan majelis tidak mengabaikan ajaran-ajaran Islam dan prinsip-prinsip konstitusi. Lembaga ini beranggotakan 12 orang yang terdiri dari 6 fuqaha yang diangkat oleh imam dan 6 ahli hukum di berbagai bidang yang diangkat oleh majelis, setelah sebelumnya diperkenalkan oleh *Shura-ye Ali-ye Qazaii* atau dewan kehakiman tertinggi. Sementara lembaga yang ketiga adalah *majles-e Khubregan* (Majelis Ahli) yang beranggotakan 73 ulama senior dan memiliki tugas utama yaitu memilih dan atau memberhentikan seorang pemimpin (imam).⁴¹

Kekuasaan Imam terlihat dari sejumlah wewenang yang dimilikinya, seperti yang tercantum dalam pasal 110 yang antara lain menyebutkan; mengangkat para Fuqaha anggota Dewan Perwalian (*Shura-ye Nigahban*) mengangkat pejabat kehakiman tertinggi negara, mengangkat dan memberhentikan Kepala Staf Gabungan dan Korps Garda revolusi Islam (*Pasdar-e-Engelab-e-Islam*), membentuk Dewan Tertinggi Pertahanan Nasional, mengangkat komandan-komandan ketiga Angkatan Bersenjata asal usul Dewan Tertinggi Pertahanan Nasional, menyatakan perang dan damai, serta mengesahkan dan memberhentikan presiden.⁴²

Beranjak dari pemilihan alternatif kerangka dasar teori yang penulis sebutkan pada bab sebelumnya, penulis menggunakan kerangka dasar teori *Decision Making Model I* : aktor rasional adalah

⁴¹ Riza Sihbudi, *et.al*, *op.cit*, hal 87-91

⁴² *Ibid*, hal 93

pilihan yang paling tepat untuk mengupas permasalahan yang penulis ajukan. Dalam hal ini penulis mencoba untuk menuangkan buah pikiran, sehingga apa yang menjadi jawaban dari permasalahan yang ada dapat pula dipahami oleh orang lain. Sehingga hal-hal yang berbau subjektifitas tanpa objektifitas dapat dihindarkan. Hal itu menunjang signifikansi keilmuan.



BAB III

IRAN PASCA IMAM KHOMAENI

3.1. Politik Luar Negeri

Suatu definisi yang standar mengatakan bahwa politik luar negeri itu adalah politik untuk mencapai tujuan nasional dengan menggunakan segala kekuasaan dan kemampuan yang ada. Interaksi antara tujuan nasional dengan sumber-sumber yang digunakan adalah subjek yang kekal dari ilmu kenegaraan. Definisi tersebut di atas belum memberikan jawaban terhadap banyak pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di belakang putusan dari pelaksanaan politik luar negeri.¹ Kita perlu mengetahui apakah terdapat unsur-unsur konflik atau kerja sama dibelakangnya, apa hubungan politik luar negeri dengan politik dalam negeri, yakni apakah peristiwa-peristiwa di dalam negeri mempunyai konsekuensi-konsekuensi internasional, atau sebaliknya politik luar negeri itu mempunyai dampak-dampak domestik.

Selanjutnya siapa yang menentukan dan menetapkan politik luar negeri dan siapa pula yang melaksanakannya. Di negara-negara demokratik terdapat apa yang disebut *interest groups* dan *pressure groups*. Struktur politik ekonomi dan kepribadian nasional suatu bangsa, kebudayaan, ideologi, sejarah masa lampau dan lokasi geografiknya mempunyai peranan dalam penentuan politik luar negeri. Apalagi bila suatu bangsa mendapat tantangan dari luar,

¹ Suffri Yusuf, S.H., *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1989, hal 110.

maka hal ini pasti mempunyai pengaruh dalam menyusun politik luar negeri suatu negara.²

Memang banyak pertanyaan yang perlu dijawab terlebih dahulu dalam kita menganalisis politik luar negeri suatu negara, yakni apakah posisi negara itu dalam adanya pertikaian dan persaingan di dunia, mempunyai sifat ofensif, defensif, imperialis, isolasionis, intervensionis, *aligned* (terikat), *non aligned* (non-blok), netral dan sebagainya. Struktur politik dan bentuk demokrasi yang ada di suatu negara memang sangat menentukan cara mengambil keputusan dalam politik luar negeri negara itu.

Menguraikan politik suatu negara dapat dilakukan melalui abstraksi-abstraksi, generalisasi, klasifikasi, perbandingan dan evaluasi serta mencari sebab-sebab dari fenomena politik luar negeri tersebut. Cara lain ialah menangani tiap-tiap isu dan kebijaksanaan sebagaimana adanya, sesuai dengan peraturan dan dinamika hal ihwal tersebut. Penentuan putusan dalam politik luar negeri tergantung dari ideologi dan bentuk demokrasi dari suatu negara, dimana hal ini penting untuk diperhatikan kepribadian, tugas dan kewajiban pimpinan nasionalnya dan peranan *pressure groups* di negara itu, yang mempunyai daya tekanan secara psikis terhadap mereka yang berkuasa.

3.2. Penyebab Perubahan Kebijakan yang Diambil Presiden Khatami

Tindakan politik yang diambil oleh Presiden Mohammad Khatami ini untuk melakukan rekonsiliasi politik dengan Rusia di

² *Ibid*, hal 111.

saat kondisi regional timur tengah menghangat kembali, penulis menganggap adalah suatu tindakan politis yang benar, akan tetapi faktor yang lebih penting adalah pengambilan keputusan tersebut didasarkan pada keuntungan diplomatis. Penulis memandang tingkat keuntungan yang diperoleh oleh Iran cukup tinggi. Adapun sikap politik M. Khatami tersebut didasarkan pada kepentingan domestik Iran dan kelansungan politik bebas yang dilancarkan Iran. Politik bebas ini bermakna tidak pada barat, tidak juga pada timur, melainkan kemerdekaan yang berkedaulatan.

Adapun alasan-alasan terjadinya proses rekonsiliasi yang dilakukan presiden M.Khatami terletak pada 3 faktor utama yaitu faktor intern sendiri, Iran sedang melakukan pembangunan ekonomi, yang secara lansung hal ini berkaitan erat dengan situasi dan kondisi di badan pertahanan dan keamanan Iran. Pengadaan embatgo senjata dari AS pasca perang teluk membuat persenjataan Iran sedikit tertinggal.

Faktor kedua adalah faktor eksternal, dimana hampir semua sekutu AS yang phobia terhadap kekuatan fundamentalisme Islam turut pula membatasi ruang gerak politik, maupun ekonomi Iran. Dan faktor terakhir dimensi regional : faktor yang paling menonjol adalah pengeboman oleh AS (Amerika Serikat) ke Irak sesaat seteleh G.W. Bush memimpin di gedung putih, serangan terorisme yang menghancurkan WTC pun patut juga menjadi pertimbangan. Dan sebagai penunjang lain penulis melihat bahwa hampir semua wilayah bagian Rusia adalah negara kecil yang mayoritas penduduknya beragama muslim.

Struktur ilmu sosial didasarkan atas fakta perubahan sosial, penulis menganggap hal ini wajar. Termasuk dalam hal ini kajian

ilmu hubungan internasional merupakan ilmu yang didasarkan atas fakta perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat internasional. Melalui pengumpulan fakta dan analisis data ilmu hubungan internasional memusatkan perhatiannya pada apa yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat suatu negara maupun sebuah negara dengan beberapa negara lainnya, bahkan bisa juga sebaliknya.

Penulis berpendapat bahwa di dalam pembahasan permasalahan yang menggunakan teori decision making memiliki beberapa alasan. Dimana alasan-alasan tersebut penulis anggap adalah hal yang realistis walaupun hal tersebut tidak bisa lepas dari subyektifitas penulis sendiri. Adapun beberapa alasan yang dapat penulis ungkapkan adalah :

1. Suatu hal yang sangat wajar jika terdapat suatu kebijakan politik maka sebelumnya akan terjadi sebuah proses pengambilan keputusan. Berangkat dari hal ini penulis ingin lebih mengeksplorasi argumen penulis sendiri bahwa “tidak akan terjadi perubahan kebijakan dalam bentuk apapun tanpa didahului oleh pengambilan sebuah keputusan”.
2. Pengambilan keputusan adalah sebuah kalimat yang sering di dengar oleh para mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, bahkan bisa dibilang merupakan “sahabat setia” setiap perkuliahan. Penulis menganggap bahwa pengambilan keputusan politik sebuah negara diambil oleh para pembuat keputusan yang dalam hal ini sering kali dilakukan, dan yang berhak diatas legal formal adalah Kepala Negara, Kepala Pemerintahan ataupun lembaga tinggi suatu negara itu sendiri.

3. Di dalam negara Iran yang memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan adalah alim ulama' di bawah naungan Imam dan presiden serta pejabat penting kenegaraan lainnya. Berawal dari keputusan Presiden Muhammad Khatami untuk membuka hubungan Iran-Rusia inilah maka penulis berasumsi bahwa penggunaan teori decision making adalah yang lebih mudah dipahami sekaligus merupakan teori yang sering dipakai oleh para mahasiswa hubungan internasional yang terjadi antar negara.
4. Dan yang terakhir adalah pada permasalahan yang penulis sodorkan terdapat unit analisa utama yaitu Presiden Muhammad Khatami. Menilik dari hal tersebut di atas maka penulis menilai seorang Khatami adalah salah satu dari komponen decision making yang mengambil keputusan dalam hal rekonsiliasi politik antara Republik Islam Iran dengan Rusia. Walaupun kedudukan tertinggi dalam pemerintahan berada di tangan Imam.

3.3. Tanda-Tanda Terjadinya Rekonsiliasi (Poros Teheran-Moskow)

Tanda munculnya rekonsiliasi hubungan kedua negara ini tidak terlihat secara jelas pada awalnya. Hanya saja Vladimir Putin melihat kecenderungan negara bekas Uni Soviet mulai pecah dan banyak kawasan Rusia yang ingin memerdekakan diri, seperti : Azarbaizan, dan Turbekistan yang ingin membentuk negara Islam sendiri. Undangan Rusia tidak ditampik oleh Iran dan tidak terdapat

satu sumber resmi yang cukup kuat untuk bisa menjelaskan kapan dan mengapa Presiden Muhammad Khatami menolak undangan tersebut.³

Kedatangan Presiden Muhammad Khatami ke Iran kemudian diberi kesempatan untuk berpidato selama 30 menit di Majelis Rendah Parlemen Rusia. Hal lain yang cukup mendasar adalah terbentuknya sebuah partai Islam Blagodenstviye (kemakmuran) dan partai ini sudah terdaftar di Pusat Komisi Pemilihan Rusia (RCEC) yang berarti Islam sudah mendapatkan tempat di Rusia.⁴

Amerika seperti kebakaran jenggot saat melihat ulah Rusia ini. Penjelasan Vladimir Putin dan M. Khatami bahwa poros Teheran-Moskow ini tidak akan mengganggu barat.⁵ Akan tetapi Amerika tetap bersikeras menolak mentah-mentah kerja sama kedua negara ini. Hal itu dipertegas oleh Amerika yang mengusir 50 diplomat Rusia 20 hari kemudian. Aksi serupa juga di balas oleh Rusia hanya sehari setelah terjadi peristiwa pengusiran terhadap para diplomatnya.⁶

Banyak kejadian lain yang terus mengisyaratkan bahwa kerja sama Teheran-Moskow semakin erat antara lain sekutu dekat Rusia, yaitu Kuba juga menginginkan pembangunan hubungan diplomati dengan Iran. hal ini terungkap pada kunjungan resmi Presiden Fidel Castro ke Teheran selama tiga hari dan tercatat pula bahwa kunjungan ini adalah kunjungan pertama Fidel Castro selama 22

³ Harian Replubika, Senin, 5 Maret 2001.

⁴ Harian Kompas, Sabtu, 3 Maret 2001.

⁵ Harian Kompas, Jum'at, 23 Maret 2001.

⁶ Harian Kompas, Sabtu, 24 Maret 2001.

tahun setelah rezim Shah di bawah dukungan Amerika Serikat tumbang.⁷

Bahwa ketika terjadi serangan Amerika Serikat terhadap Afganistan yang disebabkan hancurnya WTC dan Pentagon yang dituduhkan pada Osama bin Laden, maka Rusia pun tidak gegabah bersikap bahkan tidak mendukung serangan Amerika tersebut.⁸ Rusia turut mengecam tindakan Amerika sedangkan di lain pihak Rusia dan Iran telah menandatangani sebuah perjanjian baru mengenai kerja sama ekonomi dan perdagangan senjata.⁹

3.4. Timbulnya Rekonsiliasi Politik Dengan Rusia

Jika dilihat dari sisi keuntungan secara politis dan tingkat ancaman bagi suatu negara, maka Iran dalam hal ini Presiden Muhammad Khatami bisa dikatakan sangat cerdas karena di tengah masa sulit menimpa negara tetangga maka ia segera merangkul kekuasaan Rusia yang nota bene pada era terdahulu menjadi rival bagi Amerika Serikat.

Dalam hal ini Presiden Muhammad Khatami telah mengambil langkah yang tepat, karena jika kita tinjau peristiwa terdahulu bahwa kejadian yang menimpa Irak bukan tidak mungkin untuk kemudian menimpa pada Iran sebab Iran dan Irak merupakan negara yang sama-sama anti Amerika. Untuk itu Iran kemudian bekerja sama dengan Rusia, negara yang maju dan modern serta rival bagi Amerika. Sebuah analog, bahwa dalam sebuah permainan domino,

⁷ Yaum Al Quds, Kedubes RI, Edisi 57, 2001.

⁸ The Jakarta Post,

⁹ Yaum Al Quds, Kedubes RI, Edisi 58, 2001.

ketika sang pemain memiliki kartu dominan maka ia cenderung untuk menekan pemain lain di bawahnya dan hal tersebut juga terjadi pada pemain berikutnya, sehingga dengan demikian pemain yang menang adalah tetap pemain yang memiliki kartu dominan. Sedangkan dalam hal ini Amerika sebagai negara hegemoni di dunia, telah melakukan tekanan pada Irak, maka sebagai negara tetangga Iran juga mengalami kekhawatiran. Untuk itulah Presiden Muhammad Khatami berusaha mengadakan hubungan kerja sama dengan negara dan kekuasaan lain yang dipandang mampu bersaing dengan Amerika dengan tujuan akhir permainan tidak mutlak harus dimenangkan oleh Amerika dan Iran tidak mendapat keuntungan apapun.

Sebenarnya, Iran secara tidak sadar juga telah dimanfaatkan oleh Rusia (Vladimir Putin), karena dengan adanya kerja sama tersebut diharapkan mampu meredam gejolak di wilayah-wilayah bekas Uni Soviet yang ingin memisahkan dengan Rusia sebab negara-negara tersebut rata-rata penduduknya adalah muslim. Tarikan akhir dari fenomena ini yaitu pengaruh Islam Iran dimanfaatkan untuk merebut simpati negara bagian tersebut untuk tetap berada di genggaman Rusia.

3.5. Politik Luar Negeri Iran

Sebagai suatu bangsa yang kecil yang hampir secara ajaib mempertahankan kedaulatannya yang terancam pada tahun 1919. Iran merupakan negara *status quo* yang tidak bersedia dan tidak mampu menganut politik ekspansionis aktif. Akan tetapi, kadang-kadang pemimpin politik Iran menunjukkan tidak dimilikinya

realisme politik.¹⁰ Itu adalah kasus ketika (pada Konferensi Perdamaian di Paris) Iran mencoba mengajukan tuntutan atas daerah kurdi di Irak utara. Juga tuntutan Iran atas pulau Bahrein, prorektorat, Inggris yang terletak di teluk Persia dan didiami orang Arab. Sementara tuntutan terhadap Irak dan daerah Rusia dengan cepat terlupakan, tuntutan terhadap kepulauan dibangkitkan kembali untuk tujuan menghasut yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mencari popularitas.

Sikap politik luar Negeri Iran yang bebas dan dinamis ini merupakan warisan dari pendiri Republik Islam Iran itu sendiri. Akan tetapi satu hal yang perlu digaris bawahi adalah hal ini untuk sesama Islam. Kharisma yang dimiliki di tunjang dengan kecakapan dibidang keilmuan itulah yang memuat prinsip maupun saran Imam menjadi landasan pemerintahan Republik Islam Iran.

Politik luar negeri Iran berdasarkan pada pola pemikiran Imam Khomaeni, pemikiran tersebut adalah yang dikenal sebagai slogan politik luar negeri Iran "*La Sunniyyah, La syiyyah, Islamiyah-Islamiyah*" yang berarti tidak sunni tidak syiah tapi Islam, atau untuk lebih jelas lagi yaitu pada "*La Syarqiyah La Gharbiyyah, jumhuriyah Islamiyah*". Tidak barat tidak timur tetapi pemerintahan islam.¹¹

Penulis menilai bermula dari hubungan ini politik luar negeri Iran tidak terpancang dalam satu blok saja, akan tetapi cenderung bekerja sama dengan sesama muslim ataupun siapa saja yang dapat menerima dan tidak mengkabing hitamkan Islam.

¹⁰ George Lencezowski, Timur Tengah di Tengah Kancanah Dunia, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1992, Hal, 122.

¹¹ Look Cit Imam Khomainsi

Politik luar negeri Iran dapat diklasifikasikan ke dalam dua bagian penting : (1) yang berhubungan dengan negara-negara lain di Timur Tengah dan (2) yang berhubungan dengan negara-negara adikuasa.¹²

Berkenan dengan Timur Tengah, Iran mengusahakan perdamaian dan persahabatan dengan negara-negara tetangganya. Hal ini penting karena telah lama ada rasa permusuhan antara Iran dan Turki, dan juga antara Iran dengan Afghanistan. Pada 22 April 1926, dengan dorongan Uni Soviet, Iran, Turki dan Afghanistan menandatangani perjanjian persahabatan. Walaupun begitu, masalah kurdi yang menjengkelkan masih saja menghalangi kerukunan kembali antara Ankara dan Teheran. Pemberontakan Kurdi yang terjadi selama bulan Juni dan Juli 1930 menambah kesulitan ini. Keinginan akan adanya hubungan baik dengan negara tetangga membawa penyelesaian tentang masalah perbatasan tahun 1932. Pada tahun yang sama, Raja Faisal dari Irak mengadakan kunjungan kenegaraan, pada tahun 1934 persahabatan Turki-Iran ditegaskan oleh Reza Shah dalam kunjungannya ke Ankara. Pada tahun 1937 Iran, Turki, Irak, dan Afghanistan menandatangani Pakta Saadabad yang menghasilkan Persekutuan Timur. Ini merupakan pakta nonagresi, konsultasi, dan kerja sama timbal balik dalam memadamkan aktivitas subversif di antara negara-negara peserta perjanjian. Hanya sedikit yang dapat diceritakan tentang hubungan Iran dengan negara-negara Arab. Negara-negara seperti Suriah, Libanon, atau Palestina masih di bawah mandat dan tidak mempunyai kebijakan sendiri. Umumnya Iran menjauhkan diri dari masalah negara-negara Arab dan tidak sama-sama melakukan agitasi

¹² Ibid, hal. 123



tentang Palestina. Seperti negara kebanyakan Timur Tengah, masalah utama Iran ialah hubungannya dengan negara-negara besar, bukan dengan negara-negara tetangganya di timur.

3.5.1. Hubungan Iran-Soviet

Secara tradisional negara-negara besar ini ialah Rusia dan Inggris. Setelah penanda tangan perjanjian tahun 1921, hubungan Iran dengan Uni Soviet dapat dianggap baik, namun tidak hangat. Kehangatan ini terhalangi oleh beberapa faktor. Peristiwa yang tidak menguntungkan di Gilan membuat Iran amat curiga terhadap Uni Soviet walaupun banyak pernyataan yang bersahabat dari negarabesar itu. Lagipula, berbagai pemberontakan yang terjadi kemudian di Azerbaijan dan Khorasan wilayah Iran terjadi di dekat perbatasan Soviet, dan Reza Shah mempunyai alasan yang kuat untuk mencurigai sokongan dan kerja sama rahasia para pengusaha Soviet. Sebaliknya, tekad Reza yang keji untuk menindas komunisme membuat partai komunis Iran bergerak dibawah tanah. Moskwa dibuat kesal. Di samping itu, masalah ekonomi merusak kehangatan hubungan Iran-Soviet. Soal konsesi minyak utara merupakan salah satu dari masalah-masalah tersebut. Satu ketentuan khusus dalam perjanjian yang telah dilepaskan Soviet Rusia. Oleh karena itu, Moskwa dengan bersemangat memprotes perjanjian apa pun antara Irak dan negara-negara kapitalis Barat. Suatu hal yang masih menjadi pertanyaan ialah apakah Rusia benar dari segi hukum mengingat konsesi-konsesi yang disengketakan itu bukan milik Rusia, melainkan milik Georgia. Akan tetapi, bukanlah argumentasi hukum yang terdapat dalam analisis terakhir, melainkan pertimbangan politik. Akhirnya Iran membatalkan semua

rencana yang telah disepakati dengan semua perusahaan Inggris dan Amerika pada tahun 1924. Soal tadi tidak diungkit-ungkit lagi hingga tahun 1937.¹³

Perdagangan Iran-Soviet merupakan pokok sengketa yang lain. Petrovsky, duta besar Soviet di Teheran, memberikan pernyataan yang tepat tentang hubungan Rusia-Iran "Yang diperhitungkan di Persia hanyalah Persia Utara, sedangkan yang terakhir ini seluruhnya tergantung pada Rusia. Seluruh produk Persia Utara yang dapat di ekspor hanya terdapat di pasaran Rusia. Bila Rusia tidak lagi membeli produk itu, Persia akan bangkrut dalam waktu satu bulan. Inilah kekuatan Rusia yang tidak ada padanannya pada Inggris." Pernyataan Petrovsky ini tepat, Rusia menggunakan senjata ekonomi ini beberapa kali dalam urusannya dengan Iran.¹⁴ Pada tahun 1926 percekocan mengenai hak perikanan di Laut Kaspia membuat Rusia mengadakan larangan impor dari Iran (kecuali kapas), dan sebagai akibatnya provinsi-provinsi Iran Utara menderita sekali. Secara sporadis wakil-wakil perdagangan Soviet di Iran memberikan izin impor kepada para pedagang Iran; hal ini untuk mempengaruhi orang-orang Iran atau sebagai kompensasi untuk jasa-jasa yang diberikan. Tahun 1927 dihapus atas pemboikotan atas harga diri perjanjian perikanan yang baru menguntungkan kepentingan Soviet. Dengan motivasi pertimbangan politik, Rusia tanpa ragu-ragu menumpuk produknya (seperti gula dan minyak) di pasaran Iran sehingga merusak perdagangan Iran dengan negara-negara lain. Selama tahun 1920 secara terus menerus Iran di ganggu oleh krisis-krisis hebat dalam perdagangan dengan Rusia. Iran juga dalam posisi

¹³ *Ibid*, hal 123

¹⁴ *Ibid*, hal, 124

lemah karena perdagangan bebasnya tidak dapat menahan tekanan yang dilancarkan oleh organisasi perdagangan monopoli Soviet, untuk mengelakkan ketidaksenangan itu, pada tahun 1931, Reza Shah memutuskan, untuk mengadakan monopoli perdagangan luar negeri. Dan dengan berkuasanya Hitler, secara bertahap Reza Shah melakukan reorientasi perdagangan Iran ke Jerman.

Walaupun partai komunis Iran itu lemah, menipis, dan diintimidasi, Soviet Rusia selalu waspada pada urusan-urusan Iran. Para pejabat perdagangan Soviet, mata-mata GPU, dan agen-agen komunis internasional disebarkan di seluruh negeri untuk melakukan aktivitas-aktivitas rahasia. Selama Reza Shah berkuasa, tidak mungkin terjadi revolusi walaupun banyak muncul ketidakpuasan orang-orang mengenai metode lainnya. Bila Iran sampai jatuh ke kubu komunis, hal ini hanyalah sebagai akibat dari serangan luar, dan dalam masa perang ini Rusia tidak bersedia melakukannya.

3.5.2 Hubungan Politik Luar Negeri Iran-Inggris

Hubungan Iran dengan Inggris melalui beberapa tahap. Iran lebih dekat kepada Inggris dibandingkan negara besar lainnya. Hal ini sebagian berkenaan dengan kedatangan Inggris di India dan Irak juga supremasi Inggris di Teluk Persia, terutama akibat operasi Anglo Iranian Oil Company. Di Iran, Inggris mempunyai sistem diplomatis ganda. Di satu pihak, mereka berhubungan dengan pemerintah dan di pihak lain mereka berhubungan dengan penguasa propinsi dan suku pengembara. Tahun 1928, Iran dan Inggris berselisih tentang kapitulasi unilateral dari hasil pengeboran minyak.

3.5.3 Hubungan Iran-Amerika

Pada tahun 1947, Iran kembali bersekutu dengan Amerika, terbukti dengan pidato doktrin Truman untuk membantu Yunani, Turki, dan Iran dalam bidang militer maupun ekonomi. Iran tercatat mendapatkan bantuan sebesar \$ 27.640.000 untuk perlengkapan senjata. Pada tahun 1949, hubungan ini berakhir seiring komitmen bantuan militer tidak sesuai dengan perjanjian.¹⁵

3.5.4 Dinamika Hubungan Iran-Rusia Pasca Shah Reza Pahlevi

Sebagai kilas balik dari sejarah Iran dan Rusia, yang tercatat dalam sejarah terjadi pada masa pasca Shah sampai Presiden Rafsanjani, yaitu :

1. Berkobarnya Revolusi Islam di Iran (1978-1979) yang meruntuhkan rezim dinasti Pahlevi dan membuat Amerika Serikat kehilangan sekutu terpentingnya di Teluk Parsi, memberikan angin segar pada Moskow yang berharap dapat menjalin persekutuan dengan Iran atas dasar persamaan politik luar negeri yang anti Amerika.¹⁶
2. Pada akhir tahun 1979 dan awal tahun 1980-an politik Soviet di kawasan Timur Tengah kembali mengalami kemunduran yang serius akibat invasi pasukan Soviet di Afganistan (Desember 1979).¹⁷
3. Pada awal tahun 1980-an pemerintahan Imam Khomaeni membubarkan Partai Tudeh (satu-satunya partai komunis di Iran) dan menghukum mati sejumlah pemimpin serta

¹⁵ George Lenczowski, *Timur Tengah di Tengah Kancan Dunia*, 1992, hal 134

¹⁶ Lihat, Mark N. Katz., *Soviet Policy I the Middle east*, Current history, Februari 1988, Hal 131

¹⁷ Ibid, hal 132

mengusir sejumlah diplomat Soviet dari Teheran karena didakwa melakukan mata-mata.¹⁸

4. Pada saat Gorbachev naik menjadi Presiden Uni Soviet (Maret 1985) dengan gagasan glasnost dan Perestroika telah memberikan sedikit kelonggaran pada Azarbaizan untuk mengembangkan Islam di wilayahnya.¹⁹
5. Terbongkarnya "Iran Contra" (1986) membuat kredibilitas Amerika Serikat merosot tajam di Timur Tengah dan ini memberikan angin segar lagi pada Rusia untuk menanamkan pengaruhnya di Timur Tengah. Pada Agustus 1987, saat Deputy Menteri Luar Negeri Soviet, Yuli Voronstov, berkunjung ke Iran, Moskow, dan Teheran mengumumkan ditandatanganinya perjanjian kerjasama ekonomi mereka, yang diantaranya meliputi pembangunan jaringan pipa minyak dari Iran ke Laut Hitam. Berakhirnya Perang Teluk I (Iran-Irak) yang disusul penarikan Soviet dari Afganistan, semakin mempererat hubungan Moskow-Teheran. Dan hal ini berpuncak ke kunjungan Rafsanjani ke Moskow.²⁰
6. Lawatan menteri luar negeri Bessmertnykh ke Timur Tengah yang diawali dengan mengunjungi Suriah dan Palestina dan berakhir di Uni Emirat Arab dibuktikan Soviet untuk membangun sebuah hubungan diplomatik

¹⁸ Ibid, hal.133

¹⁹ News Week, 16 Maret 1987

²⁰ Opcit, Sihbudi, hal 7

yang harmonis antara Soviet dan negara-negara di Timur Tengah.²¹

3.6. Politik Moskow di Timur Tengah

Pada awal Mei 1991, Menlu Uni Soviet (waktu itu) Alexander Bessmertnykh mengadakan lawatan ke negara-negara Timur Tengah seperti Suriah, Yordania, Israel, Mesir dan Arab Saudi. Lawatan Bessmertnykh tersebut mengandung maksud ganda yaitu mengimbangi peranan Washinton yang semakin dominan, dan sekaligus memulihkan kembali peranan Moskow dalam percaturan politik di kawasan Timur Tengah.²²

Seperti di ketahui, sejak invasi Irak di Kuwait sampai pecah perang Teluk II (Irak vs Sekutu), peranan Moskow seakan tenggelam oleh Washinton. Di satu sisi, Amerika Serikat semakin jauh melibatkan diri di Timur Tengah dan tampak berhasil muncul sebagai “polisi dunia”, sebaliknya, disisi lain, Soviet justru harus berkutat dengan berbagai masalah dalam negerinya sendiri.

Situasi tersebut sangat berlawanan dengan apa yang terjadi pada awal tahun 1980an, ketika Amerika Serikat “terdepak” dari Iran, dan Soviet justru berhasil memperkokoh pijakannya di Afghanistan, tapi, bagaimana sebenarnya politik soviet di Timur Tengah ?

²¹ News Week. 25 Februari 1991

²² M. Riza Sihbudi, Konflik Dan Diplomasi Di Timur Tengah, Mizan, Bandung, 1991, Hal, 132.

3.6.1. Pasang Surut

Sebagai sebuah negara adikuasa, Soviet lebih condong menjalin hubungan dengan negara-negara Dunia Ketiga yang dipimpin para penguasa “radikal” sangat anti imperialisme / kolonialisme yang identik dengan Amerika Serikat dan para sekutu baratnya.²³ Di kawasan Timur Tengah pun Moskow menjalin hubungan sangat erat dengan negara-negara berhaluan “radikal” seperti Mesir (dibawah Nasser), Libya, Suriah, Yaman (Selatan), dan Irak serta PLO.

Berkobarnya Revolusi Islam di Iran yang meruntuhkan rezim Dinasti Pahlevi dan yang membuat AS kehilangan sekutu terpentingnya di Teluk Parsi, memberikan angin pada Moskow. Kremlin berharap dapat menjalin persekutuan dengan Iran atas dasar persamaan politik luar negeri yang anti-Amerika.

Namun, pada akhir tahun 1979 politik Soviet di kawasan Timur Tengah kembali mengalami kemunduran yang serius. Yaitu, akibat invasi pasukan Soviet di Afghanistan (Desember 1979). Invasi tersebut tidak hanya mendapat kecaman dari negara-negara Barat, tapi juga dari negara-negara Arab dan Islam. Saudi segera menghentikan langkahnya untuk menjalin hubungan dengan Moskow, dan pada tahun 1980 Riyadh mengorganisasi KTT OKI (Organisasi Konferensi Islam) yang mengutuk invasi Soviet di Afghanistan (hanya Suriah dan Yaman Selatan yang menolak menghadiri KTT tersebut).

Berkobarnya perang Teluk (Iran vs Irak) yang dimulai penyerbuan pasukan Saddam ke wilayah Iran, September 1980, membuat hubungan Soviet Iran mendingin.

²³ *Ibid*, Hal 233

Moskow segera menghentikan bantuan militernya ke Baghdad (kendati kemudian dilanjutkan melalui negara ketiga) dan mulai membantu Teheran. Memang, bagi Soviet Iran lebih berarti ketimbang Irak. Iran adalah negara yang memiliki perbatasan terpanjang dengan Soviet. Namun, Moskow gagal menanamkan pengaruhnya di Iran.

Pada awal tahun 1980an, pemerintah Imam Khomeini membubarkan Partai Tudeh (satu-satunya partai komunis di Iran) dan menghukum mati sejumlah pimpinannya serta mengusir sejumlah diplomat Soviet dari Teheran karena didakwa mata-mata. Disisi lain, pemerintah Imam Khomeini justru meningkatkan bantuan militernya kepada para pejuang Muslim Afghan, dan tetap menjuluki Moskow sebagai "Setan Besar" lain (disamping AS).

Keberhasilan pasukan Iran mengusir penduduk Irak (1982) tidak hanya dipandang sebagai ancaman terhadap Barat dan para sekutu Arabnya, tapi sekaligus dianggap sebagai ancaman terhadap kepentingan Moskow,. Kemenangan militer Iran atas Irak dapat mengancam kepentingan Soviet di Afghannistan. Oleh sebab itu, Kremlin pun kembali melanjutkan bantuan militernya secara langsung kepada rezim Saddam Hussein guna mencegah kemenangan Iran.

Namun disisi lain, Kremlin terus berusaha memperbaiki hubungannya dengan Teheran untuk mencegah kemungkinan normalisasi Iran-Amerika Serikat. Moskow, misalnya, melanjutkan pengiriman senjatanya ke Teheran melalui Korea Utara, Vietnam, Suriah, Libya, dan sejumlah negara Eropa Timur. Sudah tentu "standar ganda" Moskow itu tidak disukai Baghdad yang kemudian "membalasnya" dengan memperbaiki hubungan dengan Amerika

Serikat dan Eropa Barat. Pada tahun 1984, misalnya, Irak menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Amerika Serikat yang terputus sejak tahun 1967.

Menjelang naiknya Gorbachev, Moskow kembali mendapat “angin” di Timur Tengah. Setelah invasi Israel ke Libanon (1982), negara-negara Arab “moderat” berkeyakinan bahwa Amerika Serikat tidak mampu menekan Israel untuk mundur dari wilayah Arab yang dicaploknya sejak tahun 1967. Mereka pun mulai memuji proposal perdamaian Timur Tengah yang diajukan Moskow, terutama yang menyerukan diadakannya konferensi internasional yang melibatkan semua pihak yang bertikai, termasuk PLO.

Sementara itu, sejumlah negara Arab mulai frustrasi karena tidak berhasil mendapatkan bantuan militer dari Amerika Serikat sebagaimana yang diharapkan. Hal ini berakibat ketakutan kalangan kongres AS bahwa bantuan militer ke negara-negara Arab dapat digunakan untuk menghancurkan Israel. Pada tahun 1984, Yordania dan Kuwait mengaskan bahwa karena AS tidak mau memenuhi kebutuhan militer mereka, terpaksa mereka menengok ke Moskow guna mendapatkan mesin perang sebagaimana yang diperlukan.

Masa Gorbachev (Maret 1985) yang dikenal dengan gagasan “glasnost” dan “perestroika”-nya, Moskow berusaha memperluas hubungannya dengan negara-negara Timur Tengah yang “non radikal”, khususnya negara-negara di kawasan Teluk Parsi. Sementara hubungannya dengan Irak kurang begitu baik, Gorbachev justru berusaha memperbaiki hubungannya dengan negara-negara Dewan Kerjasama Teluk (GCC : Arab Saudi, Kuwait, Umi Emirat Arab, Bahrain, Oman, dan Qatar) serta Iran.

Sampai nainya Gorbachev,• diantara anggota GCC hanya Kuwait yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Moskow. Pada bulan September 1985, Oman dan kemudian disusul oleh Umi Emirat Arab, untuk pertama kalinya sepakat untuk membuka hubungan diplomatik dengan Moskow. Pada musim gugur 1986, Menteri Agama UEA menghadiri sebuah konferensi Islam yang diadakan di republik Soviet Azerbaijan. Sekembalinya dari Azerbaijan ia memuji Kremlin sebagai telah “mendukung dan menghormati” kebebasan beragama bagi umat Islam Soviet.²⁴

Pada saat yang sama, Saudi, Bahrein, dan Qatar, kendati tidak mempunyai hubungan formal, namun semakin meningkatkan kontak-kontak informalnya dengan Moskow. Saudi sendiri baru membuka hubungan diplomatiknya dengan Moskow pada bulan September 1980, tidak lama setelah terjadinya invasi Irak ke Kuwait – tampaknya sebagai “hadiah” bagi dukungan Kremlin kepada Sekutu “Koalisi anti-Irak”. Riyadh punmengirimkan sekitar 350.000 eksemplar kitab suci Al-qur’an ke negara-negara bagian Soviet di Asia Tengah yang berpenduduk mayoritas Islam.²⁵

Namun, menurut Mark N. Katz, terobosan diplomatik yang paling penting terhadap negara-negara Teluk justru terjadi di Kuwait. Pada tahun 1986, rezim Enir Al-Sabah meminta AS agar melindungi tangker-tanker minyak Kuwait dari meningkatnya serangan Iran. Sebagai akibat dukungan Kuwait kepada Irak (dalam perang Teluk I). Rezim AS di bawah Ronald Reagan waktu itu, menolak permintaan Al-Sabah karena khawatir akan merugikan kontak-kontak rahasia yang tengah di jalin dengan Teheran. Permintaan yang sama segera

²⁴ *Newsweek* (9 Februari 1987)

²⁵ *The Economist* (22 September 1990).

diajukan Kuwait kepada Moskow di Teluk, AS pun akhirnya menyetujui permintaan Kuwait tersebut.

Terbongkarnya skandal “Iran-Contra” (November 1986) kredibilitas AS di mata negara-negara Arab “moderat” merosot tajam. Akibatnya, kendati menerima tawaran AS, Kuwait tetap memutuskan untuk menyewa tiga tanker minyak milik Soviet. Bagi Soviet, kesediaannya memenuhi permintaan Kuwait tidak hanya menjadi langkah awal bagi usahanya memperbaiki hubungan dengan GCC, tapi juga menjadi langkah pertamanya yang penting untuk memainkan peranan aktif untuk melindungi negara-negara GCC, sebuah peranan yang menurut Katz tadinya secara eksklusif hanya dimainkan oleh AS dan Inggris.²⁶

Kendati demikian, Moskow masih berusaha “menahan diri” untuk tidak terlalu cepat menanamkan pengaruhnya di kalangan negara-negara GCC. Menurut Katz ada dua alasan. Pertama, Moskow tidak ingin “bersaing” dengan Washinton. Kedua, Moskow tidak menghendaki memperbaiki hubungan dengan GCC berakibat pada memburuknya hubungan dengan Iran. Seperti diketahui, sampai berakhirnya Perang Teluk I (Agustus 1988), GCC dan Iran tidak pernah akur.

Kesediaan Moskow menyewa tanker kepada Kuwait itu pun sangat tidak disukai Teheran. Pada bulan Mei 1987, misalnya, sebuah *speedboat* Garda Revolusi Islam Iran (*Pasdaran*) menyerang kapal barang Soviet di Teluk. Namun, Moskow berupaya keras untuk tidak membesar-besarkan insiden tersebut. Berbeda dengan sikap AS pada waktu itu.

²⁶ *Ibid.*

Bahkan pada bulan Agustus 1987, saat Deputy Melu Soviet Yuri Voronstov berkunjung ke Iran, Moskow dan Teheran mengumumkan ditanda tangannya perjanjian kerjasama ekonomi mereka, yang diantaranya, meliputi pembangunan jaringan pipa minyak dari Iran ke laut Hitam.

Berakhirnya Perang Teluk I yang disusul kesediaan Soviet menarik seluruh pasukannya dari Afghanistan, semakin mempererat hubungan Moskow-Teheran. Pada bulan Januari 1989, misalnya, utusan khusus Imam Khomeini, Ayatullah Abdollah Amoli, menemui Gorbachev untuk menyampaikan pesan pribadi sang Imam Khomeini agar Gorbachev “mempelajari” Islam setelah matinya komunisme.²⁷

Pada bulan Juni 1989, tidak lama setelah wafatnya Imam Khomeini, Hasheni Rafsanjani mengadakan pertemuan dengan Gorbachev di Moskow. Yang menarik, Rafsanjani, (yang waktu itu masih Ketua Majelis) diberi kesempatan untuk berkotbah di sebuah masjid di Baku, ibukota Republik Soviet Azerbaijan. Mayoritas masyarakat Azerbaijan memang menganut Islam mazhab Syi'ah. Menurut Rafsanjani, penarikan mundur Soviet dari Afghanistan, matinya komunisme, dan diperluasnya kebebasan beragama bagi umat Islam Soviet, merupakan faktor-faktor pendorong bagi peningkatan hubungan Teheran-Moskow.²⁸

Sementara itu, Moskow pun berhasil mencapai persetujuan dengan Kairo tentang penjadwalan kembali utang militer Mesir kepada Soviet (yang bernilai 3 milyar dolar AS, untuk jangka waktu lebih dari 25 tahun), serta berhasil membantu rekonsiliasi di tubuh PLO, antara pendukung dan penentang Yasser Arafat. Sedangkan

²⁷ Lihat, Graham E. Fuller, “The Emergence of central Asia”, *Foreign Policy* (Spring 1990).

²⁸ *Newsweek* (25 Februari 1991)

dengan Arab Saudi, pendekatan yang dilakukan Soviet juga mulai membuahkan hasil di mana pada bulan Januari 1987, Menteri Perminyakan Hisham Nazer berkunjung ke Moskow, yang merupakan kunjungan pertama pejabat tinggi Saudi ke Moskow.

Pecahnya krisis dan Perang Teluk II, di satu sisi memang menimbulkan kerugian bagi politik Moskow di Timur Tengah. Betapa tidak, Kremlin seakan tidak berdaya menghadapi dominasi AS di kawasan ini. sebuah media milik kelompok konservatif, *Sovyet skaya Rossiya*, bahkan menuding AS dan para sekutunya tengah mempratekkan perang neo-kolonial untuk meletakkan Timur Tengah di bawah dominasi permanen Barat. Juga, karena mendukung pihak koalisi anti-Irak, Moskow, harus kehilangan salah satu sekutu terpentingnya : Irak. Seperti diketahui, Moskow adalah pemasok senjata terbesar bagi Baghdad, dan pada tahun 1972 kedua negara menandatangani perjanjian persahabatan khusus selama jangka waktu 20 tahun.

Namun, di sisi lain, Moskow bisa dikatakan menikmati “keuntungan” tersendiri dari terjadinya Krisis dan Perang Teluk II. Sementara hubungannya dengan negara-negara Arab “moderat” semakin meningkat (seperti terbukanya hubungan diplomatik dengan Saudi), hubungannya dengan para “kamerad” lamanya pun – kecuali dengan Baghdad- berhasil dipertahankan. Lawatan Beesmertnykh ke Timur Tengah yang diawali dengan mengunjungi Suriah, serta pertemuannya dengan Presiden Negara Palestina Yasser Arafat di Genewa (14 Mei 1991), jelas dimaksudkan untuk membuktikan, kendati mendukung koalisi anti-Irak namun Kremlin tidak melupakan para “sekutu tradisionalnya” di Timur Tengah.

3.6.2 Konflik Kepentingan Dari Pergolakan Azarbaijan

Keberhasilan refolusi yang menumbangkan monarki Dinasti Pahlevi, Februari 1979, membangkitkan kembali harapan tentang “perbaikan nasib” bagi kaum azeri Iran yang, juga ikut berpartisipasi dalam revolusi tersebut. Namun, sebagai mana layaknya yang sering terjadi pada sebuah revolusi, kenyataan hampir selalu jauh tertinggal dari harapan. Begitulah, hampir tidak ada perubahan mendasar pada nasib kaum Azeri, antara sebelum dan sesudah revolusi. Keinginan mereka untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar bagi dua provinsi azarbaijan (timur dan barat), ditolak mentah-mentah oleh kaum Mullah.

Sekurang-kurangnya ada dua alasan utama dibalik penolakan tersebut. *Pertama*, kekawatiran Teheran terhadap kemungkinan terjadinya disintegrasi teritorial. Karena, jika tuntutan itu dipenuhi maka propinsi-propinsi yang dihuni kaum etnis minoritas lainnya—seperti Khuzestan (yang dihuni kaum etnis Arab) dan Kurdistan—pun akan mengajukan tuntutan serupa. Dan, tidak mustahil jika tuntutan otonomi dipenuhi akan lahir tuntutan baru yaitu, pemisahan wilayah secara total. *Kedua*, sebagaimana wilayah Azerbaijan Soviet, di Azerbaijan Iran terpendam sumber-sumber minyak yang amat vital bagi nadi perekonomian negeri ini. Di Tabriz, misalnya, terdapat satu diantara lima kilang minyak terbesar di Iran.²⁹

Pada tahun-tahun pertama setelah revolusi 1979, keinginan kaum Azeri untuk memperoleh otonomi sering kali dieksploitasi oleh kelompok-kelompok oposisi demi kepentingan politik mereka sendiri.

²⁹ M Riza Sihbudi, *Bara Timur Tengah*, Mizan, Bandung, 1991, hal, 208,

Diantara kelompok-kelompok itu adalah, Partai Republik Rakyat Muslim (HJKS, *Hezb-e Jomhori-e Khalaq-e Mosalman*), *Mojahedin-e Khalaq* ("Serdadu Rakyat"), dan *Fedayeen-e Khalaq* ("Pejuang Rakyat"). Mereka, terutama HJKS yang dipimpin seorang *mullah* konservatif, Ayatullah Shariatmadari, paling lantang dalam menyerukan tuntutan otonomi Azerbaijan. Tapi, sebelum momentum revolusi kian memuncak, Shariatmadari dikenal sebagai tokoh yang tidak menghendaki keruntuhan monarki Pahlevi.³⁰

Sementara itu, Soviet pun berusaha "memancing di air keruh" sewaktu berlangsung keresahan dikalangan kaum Azeri Iran pada masa-masa awal setelah revolusi 1979. Hal ini berkaitan dengan dengan kekhawatiran Kremlin terhadap dampak revolusi Islam Iran di kalangan sekitar 50 juta Muslim soviet. Kendati tidak mendukung separatisme dan desentralisasi seperti yang terjadi pada 1945-1946, namun Moskow gencar melancarkan propaganda yang memuji "kontribusi kultur" kaum Azeri di Iran, serta menonjolkan hubungan antara kaum Azeri Iran dan azeri Soviet. Kremlin pun sempat mensponsori pembentukan Partai Demokratik Azerbaijan.³¹ Sebuah partai komunis kaum Azeri Iran yang pada 1983 dinyatakan sebagai terlarang oleh Khomeini.

Dalam meredam keresahan etnis di Azerbaijan, rezim kaum *mullah* mengkombinasikan kebijaksanaan represif dan persuatif sekaligus. Yaitu, pertama dengan memanfaatkan konflik antara petani dan tuan tanah. Melalui sejumlah Komite revolusioner (*Momiteh-e Inqilab*) dan Pasukan Pangawal Revolusi Islam (*sepah-e Pasdaran-e Inqilab-e Islami*), Teheran mempersenjatai para tuan

³⁰ Abrahamian, *Radikal Islam : Di Iranian Mujahedin*, I.B. Tauris & Co. Ltd., London 1989, hal 45-47.

³¹ Whelan, Dexon, *The Soviet Union in the Third World* Washington, 1986, hal 158-159.

tanah di Azserbaijan “dalam rangka mengembalikan ketertiban”. Kedua, dengan merehabilitasi daerah-daerah pedesaan. Setelah revolusi tercatat sudah 56 persen dari sekitar 7.800 desa di Azerbaijan (Timur dan Barat) yang direhabilitasi. Ini berarti paling tinggi dibanding dua wilayah yang dihuni kaum etnis Arab dan Kurdi yaitu, 52,5 persen desa di Khuzestan dan hanya 38,6 persen desa di Kurdistan.

Dengan mengkombinasikan kebijaksanaan represif dan persuasif—dalam berbagai bentuk variasinya—rezim mullah, terutama sejak 1983, secara relatif berhasil mengatasi problem etnis minoritas dan melumpuhkan hampir seluruh kekuatan oposisi. Hal ini, yang disusul dengan tiga kejadian penting: tercapainya gencatan senjata Irak-Iran (Agustus 1998), meninggalnya Imam Khomeini (juni 1989), menghasilkan perubahan orientasi di Iran, sebut saja “dari revolusi ke pembangunan”.

Pemerintahan baru Iran di bawah kepemimpinan Rafsanjani (dan Ali Khameini, sebagai pengganti Khomeini) yang dari visi ekonomi politik, lebih “moderat, pragmatis, dan realitis”, merasa perlu untuk lebih memusatkan perhatian pada penataan kembali infrastruktur sosial ekonomi dalam negeri, yang mengalami kerusakan berat akibat revolusi dan perang. Suatu ketika MENGATAKAN, “Revolusi akan mandek jika rakyat lapar”. Maka, ia pun segera melancarkan sejumlah gerbangkan yang dianggap dapat membantu penataan kembali infrastruktur sosial-ekonomi Iran. Di antaranya, dengan menormalisasi hubungan Iran–Soviet.

Pada Juni 1989, sekitar tiga pekan setelah meninggalnya Khomeini, Rafsanjani melakukan lawatan bersejarah ke Soviet. Inilah kunjungan pertam ke Soviet yang dilakukan salah satu tokoh paling

berpengaruh di Iran pasca-revolusi 1979. Tidak mengherankan jika Kremlin menyambut hangat kedatangannya. Rafsanjani yang waktu itu masih sebagai ketua parlemen, oleh Kremlin disambut bagaikan seorang kepala negara. Di Moscow, Rafsanjani dan Gorbachev menandatangani perjanjian bilateral yang berlaku sampai tahun 2000, yang mencakup berbagai sektor (ekonomi, iptek, kebudayaan, dan Hankam). Juga, disepakati untuk tidak mencampuri urusan intern masing-masing.

Diantara beberapa alasan yang melatar belakangi normalisasi Iran-Soviet adalah, Pertama, berhentinya perang Iran-Irak dimana sebelumnya Moscow menjadi pendukung utama Baghdad. Kedua, penarikan mundur Tentara Merah dari Afghanistan (Februari-Agustus 1989). Seperti diketahui, Khomaeni sangat mengecam keras invasi Soviet ke Afganistan (Desember 1979). Dan, ketiga, masih adanya sejumlah rintangan bagi Teheran untuk menormalisasi hubungannya dengan Blok Barat, khususnya AS dan Inggris. Padahal kebutuhan akan modal dan teknologi sangat mendesak bagi Teheran. Karenanya, "Berpaling ke Moscow" menjadi langkah yang paling pragmatis.

Namun, dengan terjadinya pergolakan di Azarbaijan Soviet, hubungan Teheran-Moscow berada pada titik yang kritis. Apalagi setelah Kremlin memutuskan menggunakan cara-cara represif dalam mengatasi pemberontakan rakyat Azarbaijan. Indikasi bakal terjadinya kemunduran dalam hubungan Teheran-Moscow sehubungan dengan kasus Azarbaijan, sudah mulai tampak. Gorbachev sendiri misalnya, secara terang-terangan menuduh adanya "Elemen-elemen Muslim Fundamentalists dibalik pergolakan di Azarbaijan", dan sejumlah media resmi Soviet menuduh Teheran

sebagai “telah mengirim senjata ke Azarbaijan”. Sebaliknya, para pemimpin Iran seperti, Ali Khamenei, Rafsanjani, dan Ketua Parlemen Mehdi Karoubi, berulang kali melancarkan kecaman–yang paling keras sejak normalisasi-terhadap Kremlin.

Sebenarnya, Teheran berada dalam posisi yang dilematis, menhadapi pergolakan di Azerbaijan Soviet. Berdiam diri berarti memberi angin pada lawan-lawan politik mereka untuk mengeksploitasi kekecewaan, yang sudah pasti timbul, dikalangan kaum Azeri Iran. Dan, membuka peluang bagi meluasnya kecaman terhadap rezim sekarang bahwa, mereka tidak konsisten dengan politik “Universalisme Islam” serta “Komitmen pada nasib kaum Mustadhafin (tertindas)” sebagai mana yang telah dicanangkan Imam Khomaini, suatu dakwaan yang selalu berusaha dihindarkan oleh penguasa Iran sekarang.

Sebaliknya, memberikan dukungan dalam bentuk apapun pada kaum Azeri Soviet, tidak hanya akan memperburuk hubungan Teheran–Moscow. Tapi juga dapat membangkitkan kembali “semangat separatisme” dikalangan kaum azeri Iran sendiri yang pada akhirnya, dapat “menular” kekelompok-kelompok etnis minoritas lainnya. Dan yang tak kalah riskannya, Teheran dapat terperosok kembali ke “gegap gempitanya revolusi” yang akan membuat terbengkalainya program rekonstruksi infrastruktur sosial-ekonomi dalam negeri.

Oleh karenanya, dalam situasi seperti tersebut, tampaknya sulit dipercaya adanya tuduhan bahwa Teheran telah memasok senjata pada kaum Azeri Soviet. Namun, tidak mustahil bahwa Iran akan memberikan dukungan (non militer) terbatas pada kaum Azeri Soviet, seraya meningkatkan pengamanan diwilayah-wilayah yang



dihuni golongan etnis minoritas lainnya. Bagaimanapun, selama belum terlaksananya normalisasi hubungan Iran dan Blok Barat, Soviet masih mempunyai arti sangat penting bagi Teheran.

3.7. Manuver Baru Iran

Diluar faktor sektarianisme, sebenarnya ada alasan lain dibalik dukungan kuat Iran terhadap Mujahidin Syi'ah. Yaitu, konflik-konflik Iran-AS dan Iran-Saudi Arabia. Seperti diketahui, AS (melalui Pakistan) dan Saudi merupakan pendukung dan donatur utama kelompok-kelompok Mujahididn Sunni dan Wahabi. Sejak pecahnya perang Afghanistan, bantuan AS diperkirakan mencapai \$ 600 juta pertahun. Sedangkan bantuan Saudi mencapai \$ 100 juta pertahun, yang sebagian besar dipberikan kepada Mujahidin Wahabi.³²

Untuk mengimbangi bantuan AS dan Saudi itulah, Iran memberikan bantuannya pada Mujahidin Syi'ah. Berapa persisnya jumlah bantuan yang diebrikan Iran, memang tidak diketahui secara pasti. Namun, menurut Dr. Nake M. Kamrani dari University Of Southern California, Iran dan Pakistan menyediakan dana sekitar \$ 2 juta perhari guna membiayai lima juta pengungsi Afgan dikedua negara tersebut. Jumlah tersebut sudah termasuk bantuan militer.³³

Tapi, seperti ditulis Asiaweek (18 Agustus 1989), Iran tampaknya mulai mengendurkan bantuannya pada Mujahidin Syi'ah. Terutama, setelah Teheran Menormalisasi hubungannya dengan Moscow. Hal ini bisa jadi benar. Apalagi jika dikaitkan dengan "kesibukan" rezim kaum Mullah dalam menata kembali infrastruktur

³² Newsweek, 21 Agustus 1989.

³³ Kamrany, "The Continuing Soviet war in Afghanistan", Curret History, Oktober 1986.

sosial-ekonomi Iran pasca perang; serasa makin menguatnya arus “moderasi dan realisme” dalam politik domestik negeri itu.

Namun, sebenarnya Iran tengah mencoba memainkan “kartu” lain untuk memperkuat tuntutan Mujahidin Syi’ah. Tidak lama setelah normalisasi hubungan Iran-Soviet, Teheran memang mengisyaratkan akan menekan Mujahidin Syi’ah agar menerima tawaran Rezim Najibullah untuk berkoalisi. Jika itu terjadi, tentu akan semakin mempersulit posisi AIG dan, sebaliknya akan memperkokoh Najibullah.

Lalu bersamaan dengan upaya-upaya untuk menormalisasi hubungan Iran-Blok barat (termasuk AS), kubu Mujahidin Sunni pun makin didesak agar menerima tuntutan Mujahidin Syi’ah. Kepada mereka, seorang diplomat barat mengatakan, “*You(AIG) must broaden your base, and the first step must be (admitting) the Shias*”.³⁴

Ternyata manuver-manuver baru Iran pun mulai membuahkan hasil. Ketika menghadiri konferensi tentang afghanistan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian Politik dan Internasional (IPIS : *Institute for Political and International Studies*) di Teheran, 2-4 Oktober 1989, para pemuka Mujahidin Sunni sudah menyatakan kesediaan mereka untuk menerima tuntutan Mujahidin Syi’ah pro Iran.³⁵

Memang masih terlalu pagi mengharapkan tercapainya persatuan-sebagai prasyarat utama mencapai kemenangan-dikubu Mujahidin. Tapi paling tidak, peluang itu kini mulai terbuka. Dan sekali lagi, hal ini membuktikan betapa pentingnya faktor Iran dalam masalah Afghanistan.

³⁴ Asiaweek, 8 Desember 1989.

³⁵ Kayham Internasional, 21 Oktober 1989.

BAB V KESIMPULAN

Revolusi Islam Iran di bawah Himpunan Ayatullah Ruhullah Khomeini adalah salah satu fenomena yang sangat spektakuler di abad XX. Sebuah Revolusi tanpa mengorbankan ribuan nyawa sebagaimana revolusi lainnya di permukaan bumi. Fenomena inilah yang merupakan titik tolak kebangkitan kekuatan diplomatis, politis Islam.

Gagasan politik luar negeri, yang mengatur kehidupan hubungan antara negara Republik Islam Iran di bawah kepemimpinannya yang terkenal adalah Wilayatul Faqih. Wilayatul Faqih sendiri dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh para ulama ahli Fiqih (hukum Islam), dan memerintah atas dasar hukum Allah di muka bumi. Dan simbol hubungan politik luar negerinya adalah "*La syarqi'yyah, La ghorbiyyah, Jumhuriyah Islamyyah Islamyyah*" yang dapat diartikan tidak barat, tidak timur tetapi Islam.

Keberadaan ini berakhir ketika Ayatullah Khomeini meninggal dunia, yang dengan demikian praktik dilapangan mengenai eksistensi wilayatul Faqih serta garis keras aliran politiknya juga sedikit-demi sedikit menurun.

Pergeseran dari idealisme radikal sampai terjadinya rekonsiliasi yang penulis kaji sebagai permasalahan utama sehingga timbul Rekonsiliasi politik dengan negara luar, adalah :

1. Pada masa Rafsanjani

Iran tampaknya sedang berubah. Majalah *The Middle East* misalnya, antara lain menulis bahwa setelah terlibat dalam perang selama 9 tahun dibawah rezim Islam garis keras, Iran kini memasuki zaman baru. Yang semula berorientasi Islami kini berangsur beralih ke modernisasi dan Kapitalis.

Hujattul Islam Ali Akbar Hashemi Rafsanjani adalah tokoh utama di balik upaya mengakhiri dualisme kekuasaan disektor eksekutif. Dengan kata lain setelah refisi konstitusi, Iran memiliki seorang presiden dengan kekuasaan eksekutif terbesar yang pertama kali sejak kemenangan revolusi Islam pada tahun 1979. Pergeseran orientasi dari revolusi Islam ke pembangunan ekonomi terlihat sejak penyusunan anggota kabinet Rafsanjani.

2. Pada masa Khatami

Kedatangan Presiden Muhammad Khatami ke Iran kemudian diberi kesempatan untuk berpidato selama 30 menit di Majelis Rendah Parlemen Rusia. Hal lain yang cukup mendasar adalah terbentuknya sebuah partai Islam *Blagodenstviye* (kemakmuran) dan partai ini sudah terdaftar di Pusat Komisi Pemilihan Rusia (RCEC) yang berarti Islam sudah mendapatkan tempat di Rusia.

Amerika seperti kebakaran jenggot saat melihat ulah Rusia ini. Penjelasan Vladimir Putin dan M. Khatami bahwa poros Teheran-Moskow ini tidak akan mengganggu barat. Akan tetapi Amerika tetap bersikeras menolak mentah-mentah kerja sama kedua negara ini.

Bahwa ketika terjadi serangan Amerika Serikat terhadap Afganistan yang disebabkan hancurnya WTC dan Pentagon yang dituduhkan pada Osama bin Laden, maka Rusia pun tidak gegabah bersikap bahkan tidak mendukung serangan Amerika tersebut. Rusia

turut mengancam tindakan Amerika sedangkan di lain pihak Rusia dan Iran telah menandatangani sebuah perjanjian baru mengenai kerja sama ekonomi dan perdagangan senjata.

3. Situasi dan kondisi

3.1. Dimensi Internal Republik Islam Iran

Syafiudin Hasibuan lebih lanjut menjelaskan, perang telah menelan lebih dari separo anggaran negara yang kemudian memunculkan krisis ekonomi yang parah. Hal ini dapat dilihat dari tingginya tingkat inflasi sebesar 300 %. Sementara itu Smith Al Hadar menjelaskan perang itu telah memporak-porandakan infrastruktur negara Iran. Hancurnya instalasi minyak, menyebabkan kapasitas produksi anjlok hingga pernah hanya sekitar 300.000 barel per hari di awal tahun 1990. Padahal sektor inilah tempat bergantung Iran untuk pendapatan luar negeri.

3.2. Dimensi Eksternal Timur Tengah Pasca Perang Teluk

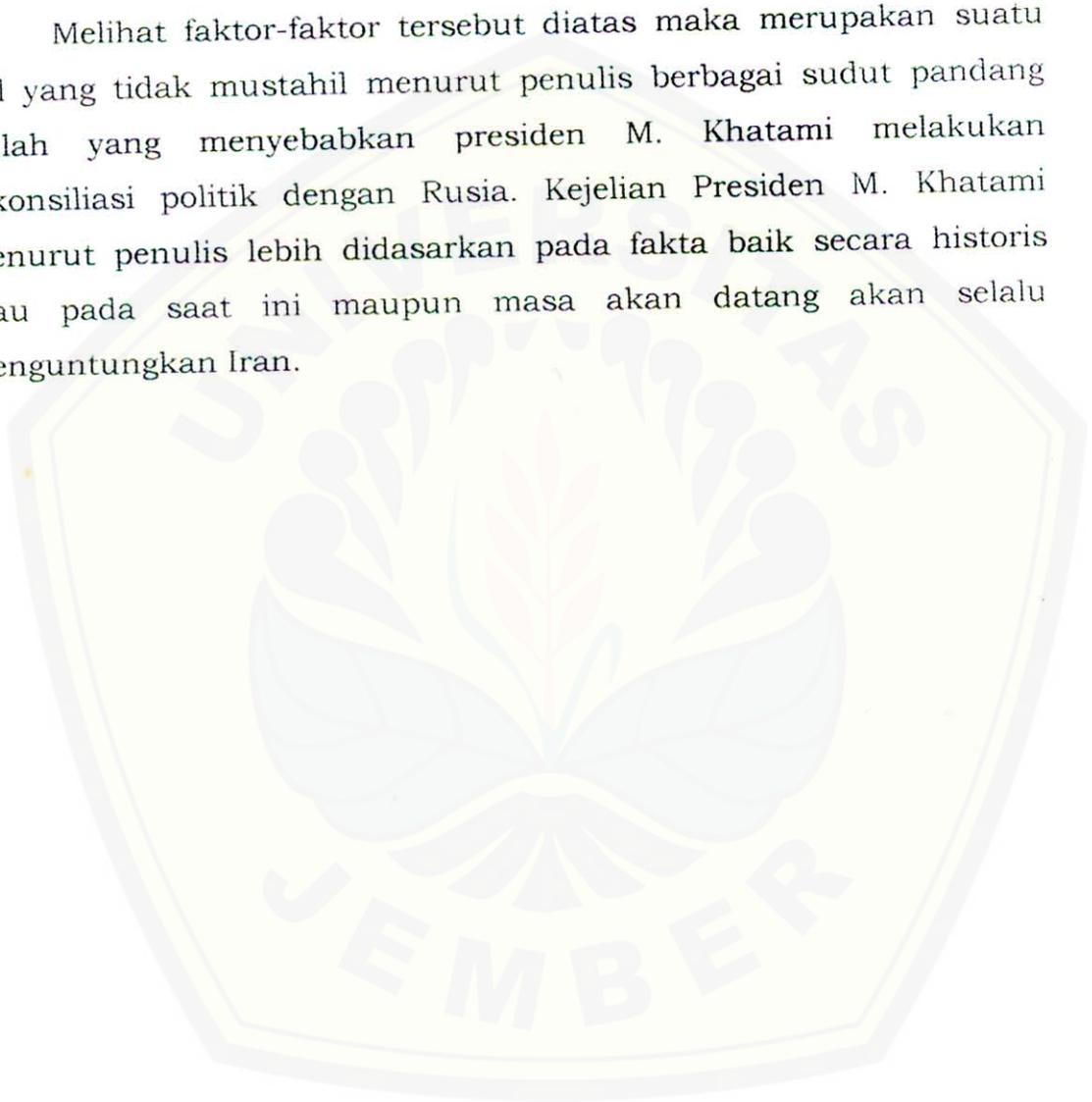
Keluarnya Amerika Serikat sebagai pemenang dalam Perang Dingin selama lebih dari empat dasawarsa, disusul pula oleh kemenangannya dalam menangani krisis teluk, baik di arena diplomasi multilateral maupun dalam Perang Teluk, telah mengukuhkan kedudukannya sebagai satu-satunya negara adidaya sejati. Sedangkan Uni Soviet tidak bereaksi, karena mungkin ia sudah merupakan negara bekas adidaya yang kini terserang virus.

3.3. Dimensi Regional (Iran dan Muslim Asia tengah)

Pada pertengahan bulan Desember 1991, atau sekitar sepekan sebelum Uni Soviet resmi dibubarkan, Menlu Iran Dr. Ali Akbar Veleiyati melakukan lawatan resmi ke enam republik Muslim Asia

Tengah. Bahkan di ibukota Republik Tajikistan, ribuan masa menyambut kedatangan Velayati dengan meneriakkan slogan-seperti, “Selamat Datang Velayati, Anda menabur kewangian Imam Khoemeini”.

Melihat faktor-faktor tersebut diatas maka merupakan suatu hal yang tidak mustahil menurut penulis berbagai sudut pandang itulah yang menyebabkan presiden M. Khatami melakukan rekonsiliasi politik dengan Rusia. Kejelian Presiden M. Khatami menurut penulis lebih didasarkan pada fakta baik secara historis atau pada saat ini maupun masa akan datang akan selalu menguntungkan Iran.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Abrahamian, Radikal Islam, 1993, **Di Iranian Mujahedin**, London, I.B. Tauris & Co. Ltd

Alkaff, Ahmad Z, 1994, **Mengenal Syi'ah**, Jember, Yayasan Al Hujjah

Alkaff, Ahmad Z, 1994, **Hukumah Islamiyah**, Jember, Yayasan Al Hujjah

Al Khatib, Abdullah dan Ihsan Ikhy Dzahis, 1997, **Perbandingan Sunnah dan Syi'ah**, Solo, CV. Pustaka Mantiq

Allison, Graham T, 1971, **Essence Of Decision (Little, Brown):Conceptual Model's and The Cuban Missile Crisis, Amerikan Political Science Review**, World Politic, vol.24

Anwar, M Dawam, 1997, **Mengapa Kita Menolak Syi'ah**, Jakarta, LIPI

Arkir, cole & Keddic, 1986, **Shi'ism and Social Protest**, London, London Press

Asyhari, Sapari Imam, 1981, **Metode Penelitian Sosial**, Surabaya, Usaha Nasional

Charles K, 1989, **The New Grescent of Crisis : Global Intifada**, London, London Press

Dexon, Whelan, 1986, **The Soviet Union in the Third World**, Washington, P. Brassey Press

Dye, R Thomas, 1978, **Understanding Public Policy**, Washington, Englewood Cliffs

Ebyhara, Abu Bakar, 1996, **Decision Making Teorys Hubungan Internasional**, Jurnal Umum Politik, Jakarta, LIPI

Eksposito, L John, 1990, **Islam dan Pilitik**, Jakarta, CV Bulan Bintang

Eksposito, L John, 1996, **Ancaman Islam: Mitos Atau Realitas**, Bandung, Mizan

Enayat, Hamid, 1988, **Reaksi Politik Sunny dan Syi'ah**, Solo, Pustaka Mantiq

Fuller, grahan E, 1990, **The Emergence of Central Asia**, Foreign Policy, New Jersey : Prentice



- Habib, Al Hasan, 1991, **Timur Tengah Pasca Perang Teluk**, Jakarta, CSIS
- Hadi, Sutrisno, 1978, **Metodologi Research Jilid I**, Yogyakarta, Gajah Mada University Press
- Kamrany, 1986, **The Continuing Soviet War in Afganistan**, London, London Press
- Katz, Mark N, 1988, **Soviet Policy in the Middle East**, Current History
- Khomaeni, Ruhullah, 1989, **Islam and Revolution**, Jakarta, Kedutaan besar Rep. Islam Iran
- Lencezowski, George, 1992, **Timur Tengah di Tengah Kancah Dunia**, Bandung, Sinar Baru Algensindo
- Mas'ood, Mohtar, 1989, **Studi Ilmu Hubungan Internasional**, Yogyakarta, Gajah Mada University Press
- Mas'ood, Mohtar, 1990, **Ilmu Hubungan Internasional**, Jakarta, LP3ES
- Me Cleland, Charles A, 1981, **Ilmu Hubungan Internasional, Teori dan Sistem**, Jakarta, CV Rajawali
- Noam, Chomsky, 1986, **International Terrorism in the Real World**, Washington, Amana Book, Inc
- Rahmad, Jalaludin, 1986, **Islam Alternatif**, Bandung, Mizan
- Rajae, Farhang, 1983, **Islamic Values in the World**, Washington DC, University Press of America
- Sihbudi, Riza, 1991, **Bara Timur Tengah**, Bandung, Mizan
- Sihbudi, Riza, 1993, **Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah**, Bandung, PT.Eresco
- Sihbudi, Riza, 1995, **Profil Negara-Negara Timur Tengah**, Jakarta, Pustaka Jaya
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, 1989, **Metode Penelitian Survei**, Jakarta, LP3IS
- Suparta, H.M dan Murtadla Muthahari, 1999, **Imam Khomaeni:Aktivitas dan Pemikirannya**, Jakarta, IAIN Syarif Hidayatullah
- Surachmad, Winarno, 1976, **Pengantar Metodologi Research**, Bandung, PN Alumni

- Habib, Al Hasan, 1991, **Timur Tengah Pasca Perang Teluk**, Jakarta, CSIS
- Hadi, Sutrisno, 1978, **Metodologi Research Jilid 1**, Yogyakarta, Gajah Mada University Press
- Kamrany, 1986, **The Continuing Soviet War in Afganistan**, London, London Press
- Katz, Mark N, 1988, **Soviet Policy in the Middle East**, Current History
- Khomaeni, Ruhullah, 1989, **Islam and Revolution**, Jakarta, Kedutaan besar Rep. Islam Iran
- Lencezowski, George, 1992, **Timur Tengah di Tengah Kancan Dunia**, Bandung, Sinar Baru Algensindo
- Mas'ood, Mohtar, 1989, **Studi Ilmu Hubungan Internasional**, Yogyakarta, Gajah Mada University Press
- Mas'ood, Mohtar, 1990, **Ilmu Hubungan Internasional**, Jakarta, LP3ES
- Me Cleland, Charles A, 1981, **Ilmu Hubungan Internasional, Teori dan Sistem**, Jakarta, CV Rajawali
- Noam, Chomsky, 1986, **International Terrorism in the Real World**, Washington, Amana Book, Inc
- Rahmad, Jalaludin, 1986, **Islam Alternatif**, Bandung, Mizan
- Rajae, Farhang, 1983, **Islamic Values in the World**, Washington DC, University Press of America
- Sihbudi, Riza, 1991, **Bara Timur Tengah**, Bandung, Mizan
- Sihbudi, Riza, 1993, **Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah**, Bandung, PT.Eresco
- Sihbudi, Riza, 1995, **Profil Negara-Negara Timur Tengah**, Jakarta, Pustaka Jaya
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, 1989, **Metode Penelitian Survei**, Jakarta, LP3IS
- Suparta, H.M dan Murtadla Muthahari, 1999, **Imam Khomaeni: Aktivitas dan Pemikirannya**, Jakarta, IAIN Syarif Hidayatullah
- Surachmad, Winardi, 1976, **Pengantar Metodologi Research**, Bandung, PN Alumni

Surachmad, Winarno, 1978, **Dasar dan Teknik Riset: Pengantar Metodologi Ilmiah**, Bandung, CV. Tarsito

Tamara, Nasir, 1980, **Revolusi Islam**, Jakarta, Sinar Harapan

The Liang Gie, 1982, **Ilmu Politik**, Yogyakarta, Gajah Mada University Press

Yusuf, Sufri, 1989, **Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri**, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan

Zainudin, A Rahman, 2000, **Syi'ah dan Politik di Indonesia**, Bandung, Mizan

....., 2000, **Imam Khomaeni : Pandangan Hidup dan Perjuangan**, Jember, Yayasan Al hujjah

Majalah

Asiaweek, 8 Desember 1989.

Kayham Internasional, 21 Oktober 1989.

Newsweek, 9 Februari 1987

News Week, 16 Maret 1987

Newsweek, 21 Agustus 1989

Newsweek, 25 Februari 1991

The Economist, 22 September 1990

Yaum Al Quds, Kedubes RII, Edisi 57, 2001.

Yaum Al Quds, Kedubes RII, Edisi 58, 2001.

Surat Kabar :

Editor, 11 Januari 1992

Kompas, 24 Juni 1989.

Kompas, 3 Maret 2001

Kompas, 19 Maret 2001.

Kompas, 23 Maret 2001.

Kompas, 24 Maret 2001

Kompas, 22 April 2001.

Pelita, 21 Mei 1991

Pelita, 22 Mei 1991

Pelita, 8 Januari 1992

Republika, 21 Mei 1997

Republika, 5 Maret 2001.

Suara Pembaharuan, 10 Maret 1989.

Suara Pembaharuan, 13 Desember 1989

.The Jakarta Post, 24 Maret 1991

Washington Post, 24 Maret 1991





CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN RESEARCH

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : DIPPUL MAULANA.....

Status : MAHASISWA.....

Alamat: JL. SUYITMAN. 125. ANRULU.....

Telah melaksanakan research/survey pada
Perpustakaan Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
dalam bidang :

" Perubahan Politik Luar Negeri Islam-Iran
dibawah Presiden Mohammad Khatami (Isu Poros
Teheran Moskow)
.....
.....
.....

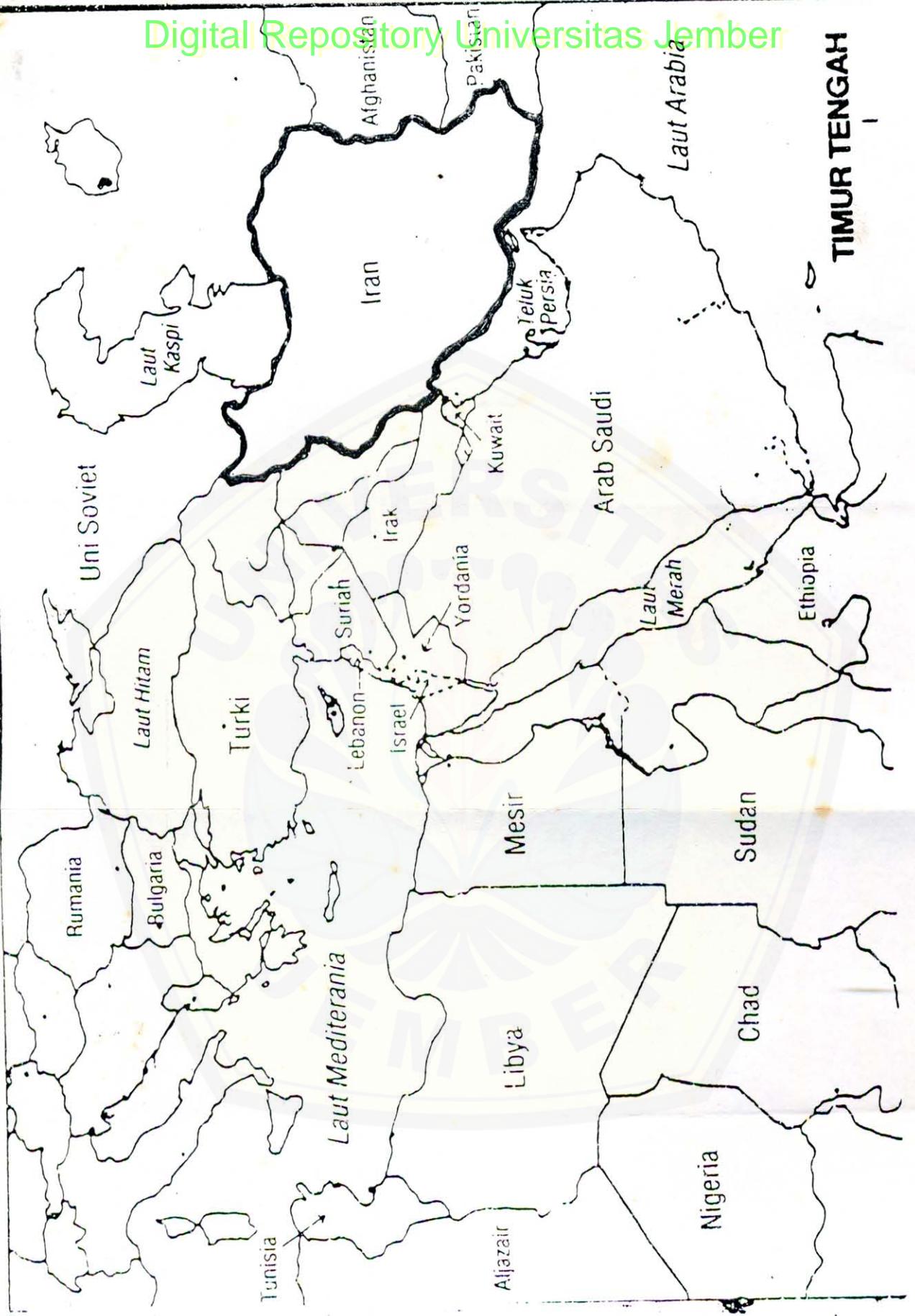
untuk keperluan penyusunan skripsi.

Demikian agar yang bersangkutan menjadi maklum.

Jakarta, 05 DESEMBER..... 2001

Maria Margrith Tirtasari

Pustakawan



TIMUR TENGAH

TABEL 1: DATA TENTANG NEGARA-NEGARA TIMUR TENGAH

NEGAR	WILYAH	PENDUDUK	AGAMA	SISTEM POLITIK	JUMLAH PASUKAN	TANK	PESAWAT TEMPUR
1. ALJAZAIR	1.46.95 km ²	22,8 juta: 75% Arab dan 25% Berber	Sunni	Republik	208.500	950	299
2. ARAB SAUDI	1.34.93 km ²	7 juta (20% pendatang)	94% Sunni; 5% Syi'ah	Monarki Absolut	65.700	550	179
3. BAHRAIN	144 km ²	458 ribu	60% Syi'ah; 30% Sunni; 10% lain-lain	Monarki Absolut	5.350	54	12
4. DJIBOUTI	1590 km ²	304 ribu	94% Sunni	Republik	5.430	-	-
5. IRAN	1.64.95 km ²	56 juta: 66% Parsi; 25% Turki; 5% Kurdi; dan 4% Arab	91% Syi'ah; 7% Sunni; 0,8% Kristen; 0,2% Yahudi; 0,1% Zaratustra	Republik Islam	604.500	500	121
6. IRAK	44000 km ²	17,8 juta: 4 juta Kurdi	57% Syi'ah; 38% Sunni; 5% lain-lain	Republik	1.000.000	5.500	513
7. ISRAEL	1555 km ²	4,2 juta: 83% Yahudi	83% Yahudi; 13% Sunni; 16% Arab	Republik/Parlementer	141.000	3.794	574
8. KUWAIT (pra-irvasi Irak)	1000 km ²	2,04 juta	79% Sunni; 15% Syi'ah; 6% lain-lain	Monarki Absolut	20.300	275	36
9. LEBANON	1.400 km ²	2,7 juta	35% Syi'ah; 25% Sunni; 25% Maronit; 7% Ortodoks; 7% Druze	Republik	22.300	-	160
10. LIBYA	1.01.974 km ²	3,9 juta	97% Sunni	Jamahiriyah ("Negara Massa")	22.000	2.000	5
11. MAURITANIA	63.726 km ²	1,7 juta	Sunni	Republik Islam	11.000	-	109
12. MAROKO	27.860 km ²	23,7 juta	99% Sunni	Monarki Absolut	192.500	224	517
13. MESIR	61.640 km ²	50,5 juta	90% Sunni	Republik	698.000	2.425	63
14. OMAN	21.000 km ²	1,5 juta: 88% Arab; 4% Baluchi; 3% Parsi; 2% India; 2% Afrika	Sunni	Monarki Absolut	25.500	6	13
15. QATAR	11.360 km ²	397 ribu: 40% Arab; 18% Pakistan; 18% India; 10% Parsi	95% Sunni	Monarki Absolut	7.000	24	63
16. SOMALIA	34.080 km ²	8,8 juta	99% Sunni	Republik	65.000	293	45
17. SUDAN	1.56.811 km ²	224 juta	73% Sunni; 18% animis; 9% Kristen	Republik	72.800	175	499
18. SURIAH	14.397 km ²	11,9 juta: 90% Arab, minoritas: Kurdi, Armenia; Turki.	70% Sunni; 13% Kristen; 5% Syi'ah	Republik	404.000	4.050	43
19. TUNISIA	101.072 km ²	8,4 juta	99% Sunni	Republik	38.000	68	500
20. TURKI	780.576 km ²	43 juta: 23% Kurdi	79% Sunni; 20% Syi'ah; 1% lain-lain	Republik/Parlementer	760.300	3.730	61
21. U.A.E.	83.650 km ²	1,7 juta	Sunni	Monarki	43.000	131	197
22. YAMAN	326.158 km ²	9,6 juta	61% Sunni; 37% Syi'ah; 2% lain-lain	Republik	64.000	1.144	111
23. YORDANIA	60.379 km ²	3,1 juta	93,6% Sunni; 5% Kristen; 1% lain-lain	Monarki-Konstitusional	85.250	1.131	-

Sumber: *Government and Politics of the Middle East and North Africa*, Westview Press, 1980.